

BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi menjadi acuan bagi Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam membangun institusi Polri harus selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Salah satu program unggulan Polri yang saat ini sudah tergelar adalah program Bhabinkamtibmas di setiap desa/ kelurahan. Hal ini sesuai dengan Surat Kapolri nomor : B/3377/XI/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011, sebagai wujud sebaran pelayanan masyarakat dengan Polsek sebagai lini terdepan pelayanan dan basis deteksi.

Bhabinkamtibmas sebagai lini terdepan pelayanan yang bertugas membina Kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa / kelurahan (SOP tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan). Dalam tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum. Terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa serta terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan Kamtibmas.

Seiring dengan globalisasi dan dinamika masyarakat yang cukup tinggi, Polri perlu meningkatkan peran Bhabinkamtibmas. Di samping melaksanakan tugas pokoknya, Bhabinkamtibmas juga mengemban fungsi Intel dalam rangka melaksanakan deteksi dini di setiap desa/kelurahan. Dengan meningkatnya peran Bhabinkamtibmas, diharapkan permasalahan yang muncul di masyarakat dapat terdeteksi langsung untuk segera ditindaklanjuti bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat serta *stake holder* lainnya.

Dengan latar belakang di atas, Puslitbang Polri selaku pembina fungsi penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri menganggap perlu melakukan penelitian tentang “Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mewujudkan Kamtibmas di Desa dan Kawasan Komunitas sebagai Basis Deteksi”. Dengan harapan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada Pimpinan Polri guna mengambil langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan agar kemitraan Polri dengan masyarakat dapat terjamin dan berkelanjutan.

Adapun yang menjadi dasar hukum mendasari pelaksanaan penelitian/pengkajian ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah beserta Perubahannya.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor beserta Perubahannya.
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009, tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa / Kelurahan.
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/53/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, tentang Rencana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2010-2014.
8. Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan (Oktober 2011).
9. Surat Perintah Kapuslitbang Polri Nomor : Sprin/11/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Pokja penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka Mewujudkan Kamtibmas di Desa dan Kawasan Komunitas sebagai Basis Deteksi.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan/ mendeskripsikan sejauhmana peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mewujudkan Kamtibmas di desa dan kawasan komunitas sebagai basis deteksi.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data, fakta dan informasi tentang peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mewujudkan Kamtibmas di desa dan kawasan komunitas sebagai basis deteksi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Polri

- a. Memberikan informasi atau masukan kepada pimpinan Polri berupa naskah akademik untuk pengambilan kebijakan dalam peningkatan peran Bhabinkamtibmas.
- b. Memberikan evaluasi terhadap implementasi program penggelaran Bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan.

2. Masyarakat

Adanya peningkatan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat didesa/kelurahan dan kawasan dikarenakan kehadiran Polisi sebagai Bhabinkamtibmas.

F. Lokasi, Waktu dan Personel penelitian

NO	POLDA	WAKTU PELAKSANAAN	PERSONEL PENELITIAN
1	2	3	4
1.	Jambi	24 s.d. 29 maret 2013	1. KBP. Drs. Suryanto 2. KBP. Drs. Didi Hardi Sopandi 3. AKBP. Drs. Sunaryanto 4. AKBP. Harti Nuraini, BA. 5. Kompol. Hanafiah Nembo 6. Drs. Ari Wahyono M,Si. 7. Penata I Ahmad Munif, S.H., M.Si.
2.	Aceh	19 s.d. 24 Mei 2013	1. KBP. Drs. Suryanto 2. AKBP. Drs. Sunaryanto 3. AKBP. Harti Nuraini, BA 4. Kompol. Hanfiah Nembo 5. Drs. Ari Wahyono, M.Si. 6. Penata I Ahmad Munif, S.H. M.Si. 7. Pengatur Dian Novitri
3.	Kalteng	28 Mei s.d. 3 Juni 2013	1. KBP. Drs. Suryanto 2. KBP. Drs. Didi Hardi Sopandi 3. Drs. Ari Wahyono, M.Si. 4. AKBP. Harti Nuraini, BA. 5. Kompol. Hanafiah Nembo 6. Penata I Ahmad Munif, S.H. M.Si. 7. Penda Selpia Nurhayati, S.Si.
4.	Jabar	30 s.d. 5 Juli 2013	1. KBP. Drs. Suryanto 2. AKBP. Drs. Sunaryanto 3. AKBP. Hanafiah Nembo 4. AKBP. Pdt. Rondang Suryani Siahaan, S.Th. 5. Drs. Ari Wahyono, M.Si. 6. Penda Febry Sutedjo, S.Si. 7. Pengatur Bahrinel Siregar
5.	Gorontalo	1 s.d 6 Sep 2013	1. KBP. Drs. Suryanto 2. AKBP. Drs. Sunaryanto 3. AKBP. Harti Nuraini, BA. 4. AKBP. Hanafiah Nembo

			5. Drs. Ari Wahyono. M.Si. 6. Penata I Nurlinah, S.E. 7. Penda Triyanti, S.E.
6.	Sultra	8 s.d 13 Sep 2013	1. KBP. Drs. Didi H. Sopandi 2. AKBP. Drs. Sunaryanto 3. AKBP. Dra. Fatimah, A.R M.M. 4. AKBP. Harti Nuraini, BA. 5. AKBP. Hanafiah Nembo 6. Drs. Ari Wahyono, M.Si. 7. Penda Selpia Nurhayati, S.Si.
7.	Bengkulu	22 s.d 27 Sep 2013	1. KBP. Drs. Suryanto 2. AKBP. Drs. Sunaryanto 3. AKBP. Pdt. Rondang S. Siahaan, S.Th. 4. AKBP. Hanafiah Nembo 5. Drs. Ari Wahyono, M.Si. 6. Penata I Ahmad Munif, S.H., M.Si. 7. Pengtu Sarmiyem

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan hasil penelitan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, dasar, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi, waktu dan personel serta sistematika penelitian.

BAB II. Kerangka Konseptual

Menyajikan tentang dasar pemikiran dari masalah yang diteliti beserta teori-teori yang mendukung untuk penyelesaian masalahnya.

BAB III. Metodologi Penelitian

Menyajikan tentang sampling penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan variabel penelitian.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyajikan tentang data hasil penelitian, pembahasan mengenai hasil pengolahan dan perhitungan data, dan temuan-temuan di lapangan, yang keseluruhannya diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan Polri dalam pengambilan keputusan.

BAB V. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Menyajikan tentang jawaban hasil keseluruhan permasalahan/ persoalan yang ada.

b. Rekomendasi

Menyajikan tentang saran / masukan untuk Pimpinan Polriguna mengambil langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan agar kemitraan Polri dengan masyarakat dapat terjamin dan berkelanjutan.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini peran Bhabinkamtibmas dilihat dari 3 (tiga) bentuk peran, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini (Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009).

A. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Dinamisator, Motivator, dan Fasilitator

Istilah dinamisator, motivator dan fasilitator kerap disebut-sebut dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, begitu juga di Polri, istilah dinamisator, motivator dan fasilitator bahkan lebih populer ketimbang sejumlah tenaga lapangan yang muncul sebelumnya, seperti penyuluh, pendamping, *communitytrainer*, ataupun *community organizer*.

Pengertian motivator adalah orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak; atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada warga masyarakat terhadap gangguan keamanan masyarakat. Sementara itu dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan (menjadikan) dinamika; hal yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Sedangkan pengertian fasilitator lebih menekankan pada membantu kelompok untuk meningkatkan efektivitas dengan cara memperbaiki proses dan struktur. Proses mengacu pada bagaimana kelompok bekerja, semisal bagaimana mereka bicara satu sama lain (berkomunikasi), bagaimana membuat keputusan ataupun mengelola konflik. Singkatnya, fasilitator adalah orang yang membantu anggota kelompok berinteraksi secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya. (*Facilitator's Guide to Participatory Decision Making*, 2007)

Peran Bhabinkamtibmas sebagai dinamisator, motivator, dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, apabila Polisi ada ditengah masyarakat. Apabila petugas Kepolisian berada di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis, maka silaturahmi dan interaksi Polisi dengan warga masyarakat, aparat lain yang bertugas di desa/kelurahan, seperti Babinsa dapat terjalin dengan baik. Polisi juga dapat melakukan program-program kegiatan kemasyarakatan sehingga menumbuhkan citra positif Polri di masyarakat.

Berangkat dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini peran dinamisator, motivator dan fasilitator dari Bhabinkamtibmas dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dan kawasan komunitas.
2. Menghadiri temu warga masyarakat yang dilakukan Bhabinkamtibmas.
3. Memberikan tambahan pengetahuan masyarakat di desa/kelurahan dan kawasan komunitas.

4. Melakukan sambang desa/warga masyarakat.
5. Mensosialisasikan tentang hukum dan perundang-undangan.

B. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat

Tugas Kepolisian di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga diamanatkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas seringkali sulit dibedakan. Pengayoman berasal dari kata ayom yang berarti melindungi, menjaga, memelihara, atau memayungi.

Pengayoman sama artinya dengan perlindungan dan penjagaan (<http://www.artikata.com/arti-358574-pengayoman.html>). Jadi dengan demikian, pengertian pengayoman lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perlindungan. Jika pengertian pengayoman dipisahkan dari perlindungan, maka pengertian pengayoman hanya berarti penjagaan, pemeliharaan dan memayungi.

Sementara itu, pengertian pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (LAN, 1998).

Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk keperluan penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas di bidang perlindungan, pelayanan dan pengayoman dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Kepolisian yang dibutuhkan masyarakat.
2. Terlibat dalam pembentukan Siskamling.
3. Membantu dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang muncul di masyarakat melalui FKPM.
4. Memfasilitasi pemecahan dan penyelesaian kasus kriminal yang terjadi di masyarakat.
5. Memberikan arahan kepada masyarakat terhadap potensi dan ancaman konflik sosial dan gangguan Kamtibmas di masyarakat.

C. Peran Bhabinkamtibmas dalam Deteksi Dini

Deteksi dini adalah salah satu tugas Intelkam yaitu sebagai mata dan telinga kesatuan Polri. Jika Polsek sebagai basis deteksi dan semua personel Polri yang bertugas di Polsek adalah petugas Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas sebagai aparat Polri lini terdepan pelayanan, berkewajiban menjalankan tugas melaksanakan deteksi dini, antara lain memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (http://arhamgusdiar.blogspot.com/2012/08/peran-intelijen-keamanan-dalam_1832.html).

Dalam penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Bhabinkamtibmas memiliki jadwal kegiatan dalam setiap kegiatan operasional.
2. Bhabinkamtibmas memiliki buku saku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Tercatatnya informasi/ Pulbaket tentang kondisi Kamtibmas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan bersifat survei dengan menggunakan metode survei lapangan, pengumpulan data dan informasi secara komprehensif untuk membantu merumuskan suatu kebijakan pimpinan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas di desa dan kawasan komunitas sebagai basis deteksi.

B. Sampling Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Desa dan Kawasan Komunitas sebagai Basis Deteksi adalah warga masyarakat dan personel Bhabinkamtibmas.

2. Responden Penelitian

Warga masyarakat dan personel Bhabinkamtibmas yang dipilih sebagai sampel penelitian ditentukan secara random yang dipilih oleh Polres masing-masing. Jumlah responden penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Jumlah Responden Penelitian Menurut Lokasi Penelitian

No.	Polda	Jumlah Responden	
		Bhabinkamtibmas	Masyarakat
1.	Jambi	53	81
2.	Kalimantan Tengah	54	139
3.	Aceh	63	215
4.	Jawa Barat	72	211
5.	Gorontalo	41	89
6.	Sulawesi Tenggara	31	102
7.	Bengkulu	55	155
Total		369	992

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data utama dalam penelitian karena merupakan alat untuk mengetahui terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mewujudkan Kamtibmas di desa dan kawasan sebagai basis deteksi. Hal-hal yang ditanyakan dalam kuesioner ini dapat dilihat pada lampiran.

2. Metode FGD (*Focus Group Discussion*)

Metode FGD digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi kehadiran atau keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan/komunitas. Peserta FGD berasal dari personel Polri (Kasat Binmas, Kasat Intel, Kapolsek, Kanit Binmas, Bhabinkamtibmas) dan perangkat desa/kelurahanserta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lain.

3. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sarana prasarana, dukungan anggaran, dokumen administrasi dan statistik yang mengatur tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

D. Pengolahan Data

Hasil kuesioner selanjutnya diolah dengan menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Editing

Melakukan pengecekan kembali terhadap kemungkinan kesalahan jawaban responden serta ketidaksesuaian informasi dari data yang telah dikumpulkan.

2. Coding

Memberikan tanda-tanda ataupun kode-kode sesuai dengan keperluan sehingga dapat dihitung dan ditabulasikan.

3. Tabulasi

Memasukkan data kedalam program SPSS (*entry data*) dan dilakukan analisa. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan cara menggabungkan variabel yang sama kedalam satu kesatuan.

Sedangkan data hasil FGD diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil FGD dimaksud sangat berguna untuk memberikan penajaman dari hasil kuesioner.

E. Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses analisis dari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif sederhana dengan menampilkan tabel atau grafik hasil tabulasi data. Teknik tersebut untuk memperlihatkan seberapa besar peran Bhabinkabtibmas dalam rangka mewujudkan Kamtibmas di desa dan kawasan sebagai basis deteksi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk melihat peran Bhabinkamtibmas, maka ada 3 (tiga) pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu; (1) seberapa jauh terdapat peran Bhabinkamtibmas terkait dengan strategi berkomunikasi di masyarakat dalam rangka memberikan penyuluhan

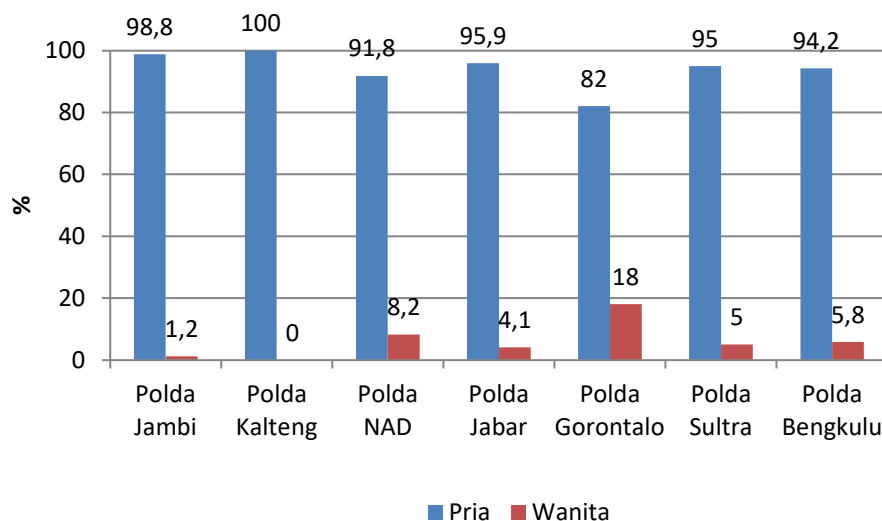
hukum; (2) seberapa jauh peran Bhabinkamtibmas terkait perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat dalam rangka menjalankan tugas Polri; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran Bhabinkamtibmas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Responden Masyarakat

Dari total responden, persentase jumlah responden wanita sangat kecil, jika dilihat per Polda jumlah persentase responden wanita yang terbesar terdapat di Polda Gorontalo (18%). Kecilnya jumlah responden wanita dalam penelitian tentunya sangat berpengaruh terhadap data hasil penelitian tentang tugas dan peran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara utuh, karena suara wanita dalam pengumpulan data ini sangat penting untuk mendapatkan informasi dari responden yang seimbang, misalnya terkait dengan KDRT dimana wanita biasanya sebagai pihak korban.

Grafik 4.1.
Distribusi jumlah responden masyarakat berdasarkan jenis kelamin

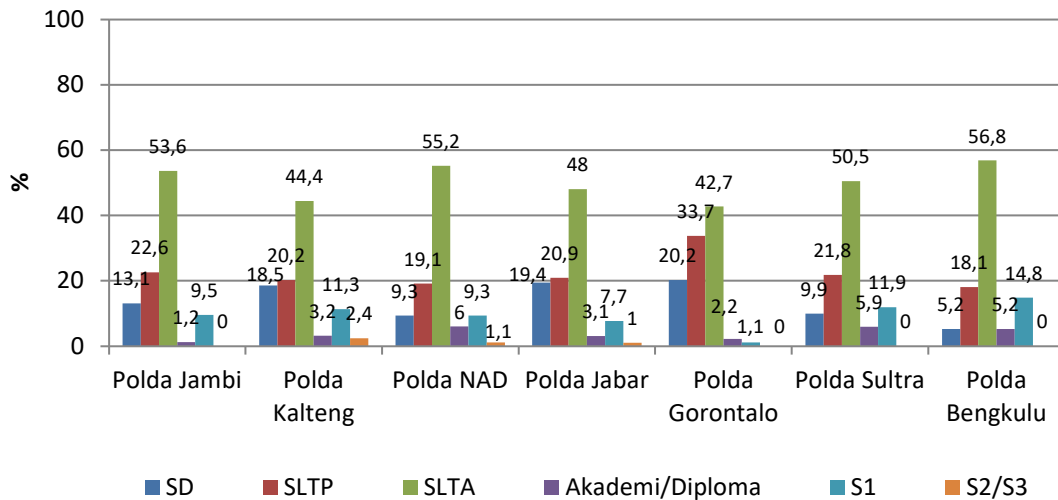


Sumber : Data kuesioner penelitian

Karakteristik responden penelitian dilihat berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh responden yang berlatar belakang SLTA. Mayoritas responden yang berlatar belakang SLTA merata di semua Polda lokasi penelitian. Rata-rata persentase responden yang

berlatar belakang SLTA berkisar antara 42,7% sampai dengan 56,8%. Jika ditambahkan dengan responden yang berlatar belakang perguruan tinggi, persentase responden menjadi sekitar 61,3 % sampai dengan 77,7%. Latar belakang pendidikan responden menunjukkan tingkat kemampuan responden untuk memberikan respon atau pendapat terhadap kinerja Bhabinkamtibmas di desa/kelurahantempat responden berdomisili.

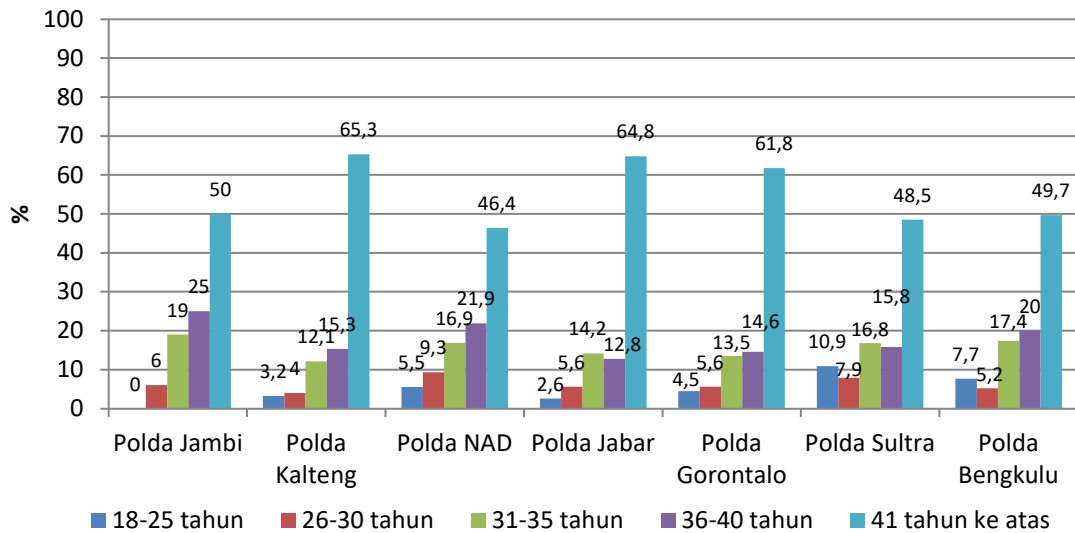
Grafik 4.2.
Distribusi jumlah responden masyarakat berdasarkan pendidikan terakhir



Sumber : Data kuesioner penelitian

Usia menggambarkan pengalaman hidup warga masyarakat. Semakin responden berumur semakin menunjukkan kemampuan melakukan refleksi pengalaman hidup. Penelitian peran Bhabinkamtibmas di masyarakat semakin optimal hasilnya jika responden penelitian memiliki pengalaman panjang sehingga mampu memberikan jawaban-jawaban yang diminta dalam kuesioner. Pada grafik 4.3 menunjukkan bahwa responden yang memiliki usia di atas 41 tahun mendominasi responden penelitian ini, yaitu berkisar antara 48,5% sampai dengan 65,3%, yang tersebar di tujuh Polda lokasi penelitian. Hal ini memberikan gambaran atau asumsi bahwa responden tidak mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban kuesioner yang diajukan dalam penelitian ini karena telah memiliki pengalaman hidup sehingga mampu merespon terhadap keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahannya.

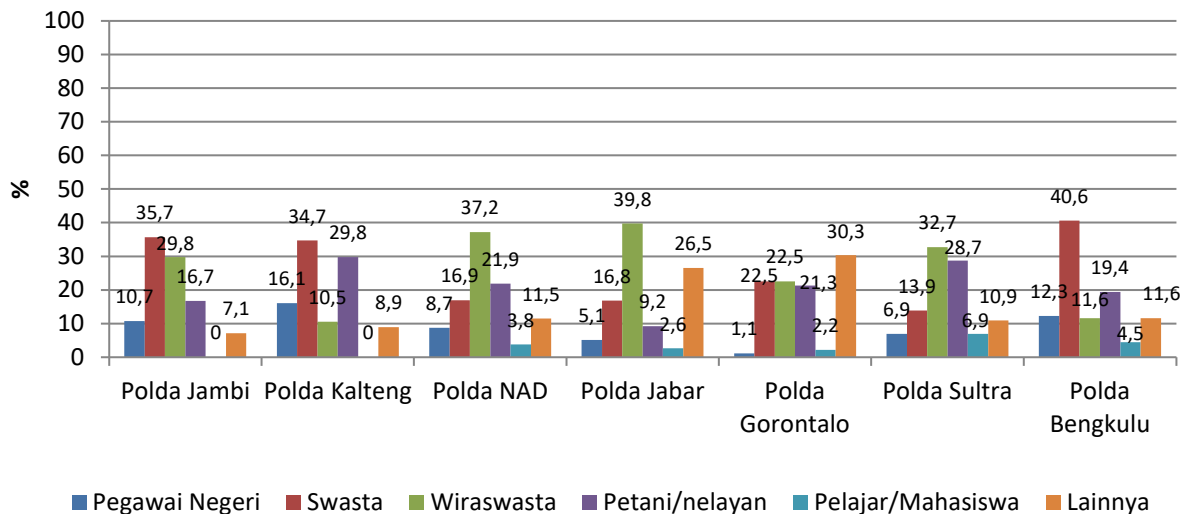
Grafik 4.3.
Distribusi jumlah responden masyarakat berdasarkan usia



Sumber : Data kuesioner penelitian

Pegawai swasta, wiraswasta dan petani/nelayan adalah latar belakang responden penelitian yang paling menonjol di Polda lokasi penelitian. Latar belakang pekerjaan ini juga mencerminkan bahwa pegawai swasta, wiraswasta dan petani/nelayan merupakan matapencaharian utama warga masyarakat pedesaan, dan sebaliknya kalangan mahasiswa/pelajar dan pegawai pemerintahan sangat sedikit yang menjadi responden penelitian ini.

Grafik 4.4.
Distribusi jumlah responden masyarakat berdasarkan pekerjaan



Sumber : Data kuesioner penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, maka profil responden penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sampel penelitian lebih banyak didominasi responden laki-laki.
- Sebagian besar sampel penelitian berasal dari responden yang memiliki jenjang SLTA, dan usia di atas 41 tahun.
- Sebagian besar sampel penelitian memiliki pekerjaan sebagai petani/nelayan, pegawai swasta dan wiraswasta.

B. Peran Bhabinkamtibmas

1. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Pembimbing

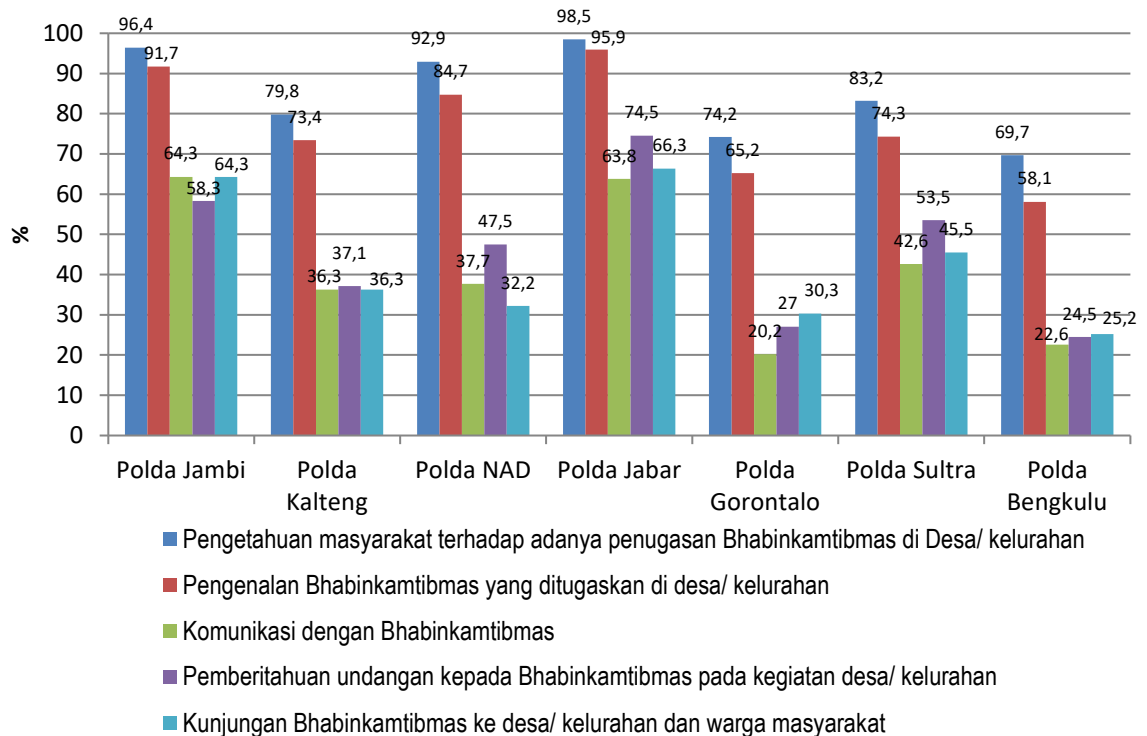
a. Kehadiran Bhabinkamtibmas

Responden warga masyarakat telah mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahannya. Jika dibuatkan rangking, hampir semua responden masyarakat mengetahui adanya penugasan Bhabinkamtibmas. Hal ini dapat dilihat pada Polda Jabar 98,5%, Polda Jambi 96,4%, Polda NAD 92,8%, dan Polda Sultra 83,2%. Sementara itu, Polda lainnya menunjukkan sebuah potret bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas belum diketahui secara menyeluruh oleh responden penelitian ini, dan hal ini ada pada Polda Kalteng 79,8%, Polda Gorontalo 74,2% dan Polda Bengkulu 69,7%.

Belum diketahuinya kehadiran Bhabinkamtibmas oleh sebagian responden di Kalteng antara lain disebabkan oleh ketiadaan sarana transportasi dalam pelaksanaan tugas. Sebagaimana diketahui karakteristik wilayah pedesaan di Kalteng didominasi oleh transportasi air, masyarakat berdomisili disekitar daerah aliran sungai (DAS). Begitu pula di wilayah Bengkulu, masyarakat berdomisili tersebar di daerah terpencil pegunungan.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan tidak otomatis memberikan gambaran aktifitas yang dilakukan. Dari grafik 4.5 terlihat Bhabinkamtibmas yang aktif melakukan pengenalan di desa/warganya terjadi di Polda Jabar, Polda Jambi dan Polda NAD. Responden masyarakat yang mengemukakan bahwa Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan pengenalan diri Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan di ketiga Polda cukup besar, yaitu Polda Jabar 95,9%, Polda Jambi 91,75, dan Polda NAD 84,7%. Ini artinya Polda-Polda lainnya yang menjadi lokasi penelitian Bhabinkamtibmas belum seluruhnya melakukan pengenalan diri di desa/kelurahannya.

Grafik 4.5.
Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan



Sumber : Data kuesioner penelitian

Terkait dengan peran lain Bhabinkamtibmas yang dilakukan di desa/kelurahan menunjukkan kecenderungan personel Bhabinkamtibmas jarang melakukan komunikasi di desa/kelurahan yang menjadi binaannya. Jika dilihat dari grafik 4.5 hanya Polda Jambi dan Polda Jabar yang Bhabinkamtibmasnya menjalin komunikasi cukup baik di desa/kelurahannya dibandingkan dengan Polda lain yang menjadi lokasi penelitian. Di Polda Jambi terdapat sekitar 64,3% dan di Polda Jabar sekitar 63,8% responden warga masyarakat yang berpendapat bahwa Bhabinkamtibmas melakukan komunikasi di desa/kelurahannya. Sementara itu, komunikasi yang dijalin Bhabinkamtibmas di Polda-Polda lainnya dapat dikategorikan rendah. Sebagian kecil responden warga masyarakat yang mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas telah melakukan komunikasi di desa/kelurahannya, yaitu Polda Gorontalo 20,2%, Polda Bengkulu 22,6%, Polda Kalteng 26,3%, Polda NAD 37,7%, dan Polda Sultra 42,6%. Sebagai contoh hasil FGD menunjukkan rendahnya komunikasi Bhabinkamtibmas di Polda NAD disebabkan masih adanya trauma kejadian penculikan personel Polri khususnya daerah yang berbasis GAM. Demikian pula di Polda Gorontalo dan Bengkulu, rendahnya komunikasi disebabkan jauhnya sebaran domisili masyarakat di desa/kelurahan terpencil pegunungan.

Kehadiran Bhabinkamtibmas dapat dilihat dari sejauhmana Bhabinkamtibmas mendapatkan undangan dari desa/kelurahan. Berdasarkan grafik 4.5. menunjukkan kecenderungan yang sama dengan perilaku Bhabinkamtibmas

dalam berkomunikasi dengan masyarakat, kecuali Bhabinkamtibmas di Polda Jabar menunjukkan keaktifan yang cukup. Sekitar 74,5% responden warga masyarakat mengemukakan bahwa Bhabinkamtibmas mendapat pemberitahuan undangan dari desa/kelurahan yang menjadi binaanya. Sementara itu di Polda lainnya dapat dikatakan kurang ada interaksi antara Bhabinkamtibmas dengan desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas jarang berkunjung ke desa/kelurahan dalam rangka memenuhi undangan Kepala Desa/Lurah.

Jika diurutkan berdasarkan tingkatan yang paling rendah, angka persentase responden warga masyarakat yang mengemukakan kehadiran Bhabinkamtibmas berdasarkan undangan dari desa/kelurahan, dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Polda Bengkulu (24,5%), (2) Polda Gorontalo (27%), (3) Polda Kalteng (37,1%), (4) Polda NAD (47,5%), (5) Polda Sultra (53,5%), dan (6) Polda Jambi (58,%). Kecenderungan ini menggambarkan bahwa desa/kelurahan belum optimal memanfaatkan Bhabinkamtibmas yang ditunjuk untuk bertugas di desa/kelurahannya. Temuan ini tidak bertolak belakang dengan hasil FGD dengan Kepala Desa/Lurah dan tokoh masyarakat yang dilakukan di setiap Polres/ta, bahwa terdapat sebagian Kepala Desa/Lurah tidak memahami dan mengerti tugas Bhabinkamtibmas yang berada di desa/kelurahannya.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator dalam penelitian ini juga dilihat dari kunjungan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya. Kunjungan Bhabinkamtibmas paling tidak memiliki tujuan memberikan motivasi atau memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam rangka memberikan rasa aman di masyarakat. Berdasarkan grafik 4.5 diperoleh hasil yang tidak menggembirakan bahwa kunjungan Bhabinkamtibmas dapat dikategorikan tidak optimal. Hasil survei ini menunjukkan bahwa persentase responden warga masyarakat yang mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas berkunjung ke desa/kelurahan yang menjadi binaannya paling besar hanya 66,3% dan 64,3% yang terjadi di lokasi penelitian Polda Jabar dan Polda Jambi. Sementara itu, persentase responden warga masyarakat yang mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas berkunjung ke desa/kelurahan di wilayah Polda lainnya di bawah 50%, yaitu Polda Bengkulu 25,2%, Polda Gorontalo 30,3%, Polda NAD 32,2%, Polda Kalteng 36,3%, dan Polda Sultra 45,5%.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa interaksi antara Bhabinkamtibmas dengan desa/kelurahan dan masyarakat belum optimal dilakukan. Dari ketujuh Polda sampel penelitian terlihat Polda Jabar paling menonjol dalam menggerakkan Bhabinkamtibmas di desa/masyarakat. Hal ini terlihat pula dari FGD yang dilakukan di beberapa Polres sampel di Polda Jabar, yang telah melakukan inovasi dalam membangun komunikasi, seperti misalnya Pisang Kamtibmas/Binmas *Pioneer* (Polres Sumedang), pendataan usia produktif untuk dikaryakan (Polresta Sukabumi).

b. Keaktifan Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan

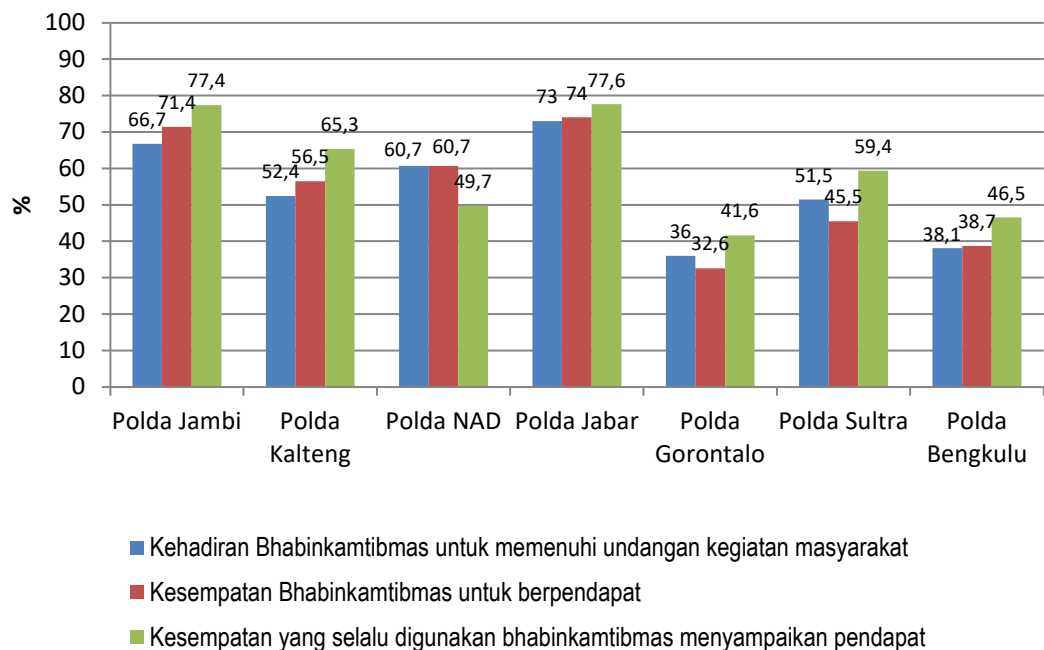
Keaktifan Bhabinkamtibmas dalam penelitian ini juga diukur dari sejauhmana warga masyarakat melihat Bhabinkamtibmas memenuhi undangan masyarakat.

Berdasarkan grafik 4.6 dapat diurutkan berdasarkan angka persentase responden terbesar yang menjawab bahwa Bhabinkamtibmas telah memenuhi undangan adalah Polda Jabar 73%, Polda Jambi 66,7%, Polda NAD 60,7%, Polda Kalteng 52,4%, Polda Sultra 51,5%, Polda Bengkulu 38,1%, dan Polda Gorontalo 36%.

Uraian di atas memberikan sebuah gambaran bahwa Bhabinkamtibmas belum optimal memenuhi undangan masyarakat. Kesimpulan ini cukup masuk akal karena berdasarkan FGD di Polres-Polres lokasi penelitian bahwa Bhabinkamtibmas tidak bisa memenuhi undangan masyarakat karena menjalankan tugas pokoknya di Polsek. Jadi dengan demikian, para Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa/kelurahan memiliki tugas rangkap. Adanya tugas rangkap ini yang menjadikan Bhabinkamtibmas tidak selalu bisa memenuhi undangan masyarakat. Selain tugas rangkap, para Bhabinkamtibmas dihadapkan terhadap minimnya dukungan anggaran sebagai sarana kontak.

Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut, yakni apakah kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara aktif menyampaikan pendapat atau tampil di depan publik untuk memberikan pesan-pesan atau penyuluhan yang terkait dengan tugas Bhabinkamtibmas di desa/kelurahannya, ternyata hanya Bhabinkamtibmas di Polda Jabar dan Polda Jambi yang lebih dominan yang berpendapat dalam kesempatan diundang di desa/kelurahan. Hal ini terlihat pada grafik 4.6 sekitar 74% responden warga masyarakat di Polda Jabar dan 71,4% Polda Jambi yang mengemukakan pendapat setiap kali diundang di desa/kelurahan.

Grafik 4.6.
Keaktifan Bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan



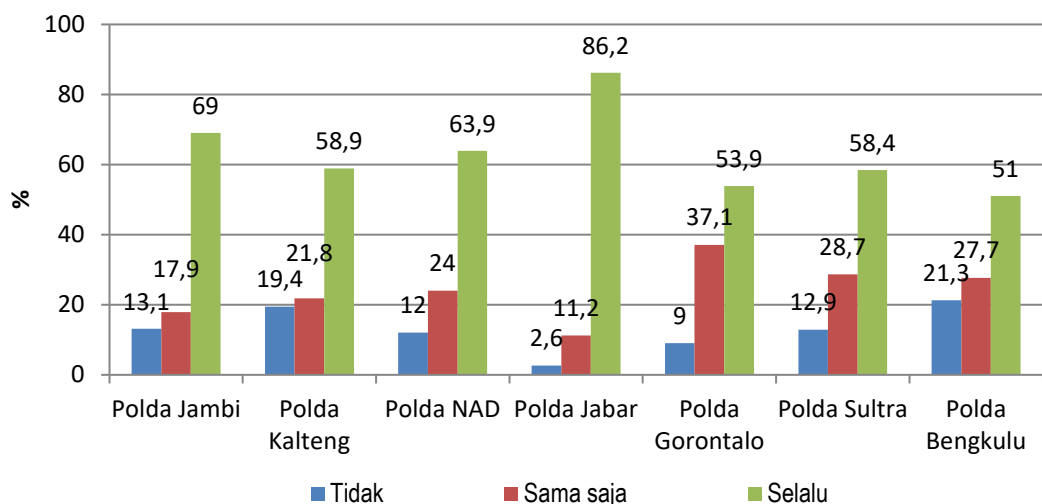
Sumber : Data kuesioner penelitian

c. Tambahan Pengetahuan Masyarakat dengan Adanya Bhabinkamtibmas

Kegiatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu tugas Polri. Jika melihat grafik 4.7, pengaruh kehadiran Bhabinkamtibmas terhadap peningkatan pengetahuan/wawasan masyarakat di bidang Kamtibmas lebih terasa di Polda Jabar, hal ini ditunjukkan sekitar 86,2% responden warga masyarakat yang mengaku mengalami peningkatan wawasan Kamtibmas dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas. Sementara itu, persentase responden warga masyarakat di Polda-Polda lainnya menyatakan bahwa pengaruh kehadiran Bhabinkamtibmas terhadap peningkatan wawasan Kamtibmas tidak begitu besar, yaitu di wilayah Polda Jambi 69%, Polda NAD 63,9%, Polda Kalteng 58,9%, Polda Sultra 58,4%, Polda Gorontalo 53,9%, dan Polda Bengkulu 51%.

Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas belum memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan/wawasan masyarakat di bidang Kamtibmas.

Grafik 4.7.
Pengaruh kehadiran Bhabinkamtibmas terhadap peningkatan pengetahuan/ wawasan masyarakat di bidang Kamtibmas

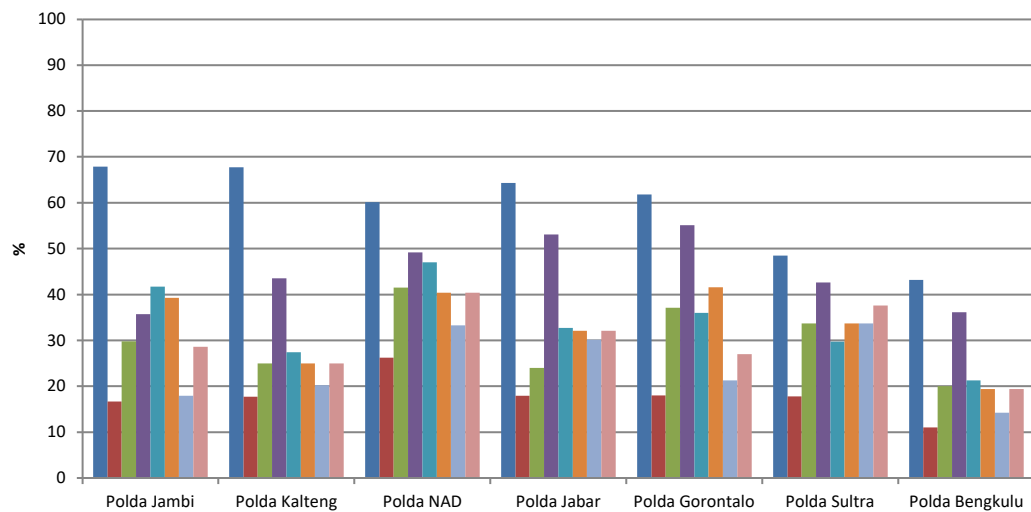


Sumber : Data kuesioner penelitian

Selain pengetahuan wawasan Kamtibmas, kehadiran Bhabinkamtibmas di masyarakat desa/kelurahan diharapkan juga memberikan pengetahuan lainnya. Jika melihat grafik 4.8, dapat dikatakan bahwa keamanan lingkungan dan tertib berlalu lintas adalah wawasan/pengetahuan yang diperoleh dari kehadiran Bhabinkamtibmas, yang dipilih paling banyak responden warga masyarakat. Sedangkan perdagangan anak dan terorisme adalah wawasan/pengetahuan yang paling sedikit diketahui oleh responden penelitian. Grafik 4.8 juga dapat dibaca bahwa angka persentase responden warga masyarakat kecil (di bawah 50%), yang merasakan tambah pengetahuan atau wawasan dengan adanya kehadiran

Bhabinkamtibmas. Hal ini terjadi di semua Polda sampel penelitian untuk jenis wawasan pengetahuan yang ditanyakan mulai dari narkoba, perdagangan anak, kenakalan remaja, KDRT, teroris, tertib berlalu lintas dan HAM. Sedangkan penambahan wawasan pengetahuan responden penelitian terjadi pada keamanan lingkungan tetapi hanya di tiga Polda, yaitu Polda Jambi, Polda Kalteng, dan Polda Jabar.

Grafik 4.8.
Bertambahnya pengetahuan/ wawasan masyarakat di bidang Ipoleksosbud



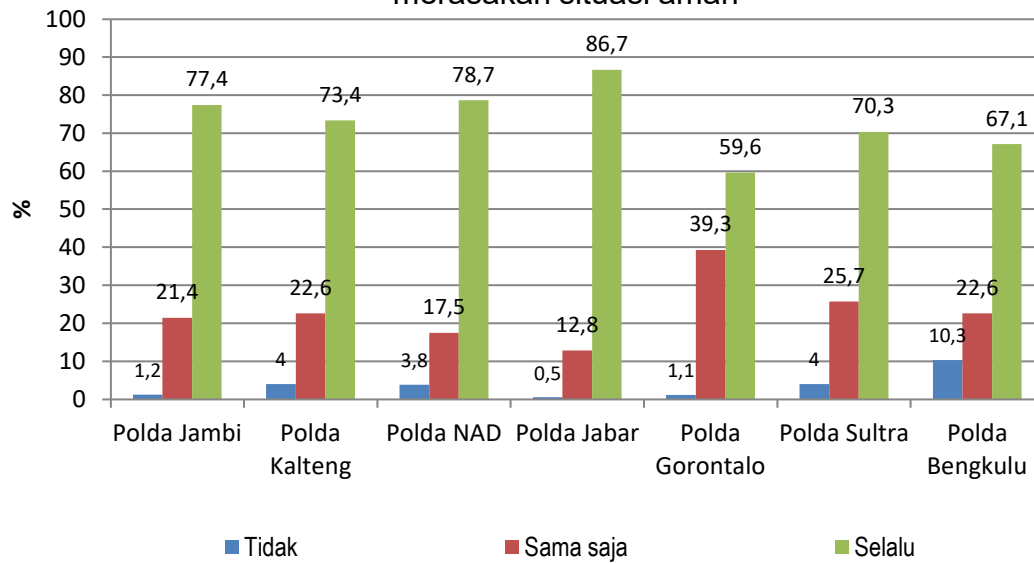
Sumber : Data kuesioner penelitian

2. Peran
 ■ Keamanan lingkungan ■ Perdagangan anak ■ KDRT ■ Tertib berlalu lintas ■ Bahaya narkoba ■ Kenakalan remaja ■ Teroris ■ HAM*

2. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat

Situasi rasa aman merupakan dambaan setiap warga masyarakat. Keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan diharapkan semakin memberikan rasa aman di masyarakat. Dari berbagai FGD dengan warga masyarakat, masyarakat selalu mengharapkan kehadiran petugas Kepolisian setiap hari di desa/kelurahannya karena dapat menekan angka kriminalitas di desa/kelurahan, seperti pencurian ternak, kenakalan remaja, dll. Oleh sebab itu, bagi responden warga masyarakat dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas dapat menjadikan masyarakat merasakan situasi tenteram. Grafik 4.9 berikut ini menunjukkan adanya harapan responden masyarakat terhadap kehadiran Bhabinkamtibmas, hal ini terlihat rata-rata di atas 70% responden warga masyarakat yang merespon kehadiran Bhabinkamtibmas karena dapat menjadikan situasi aman di masyarakat.

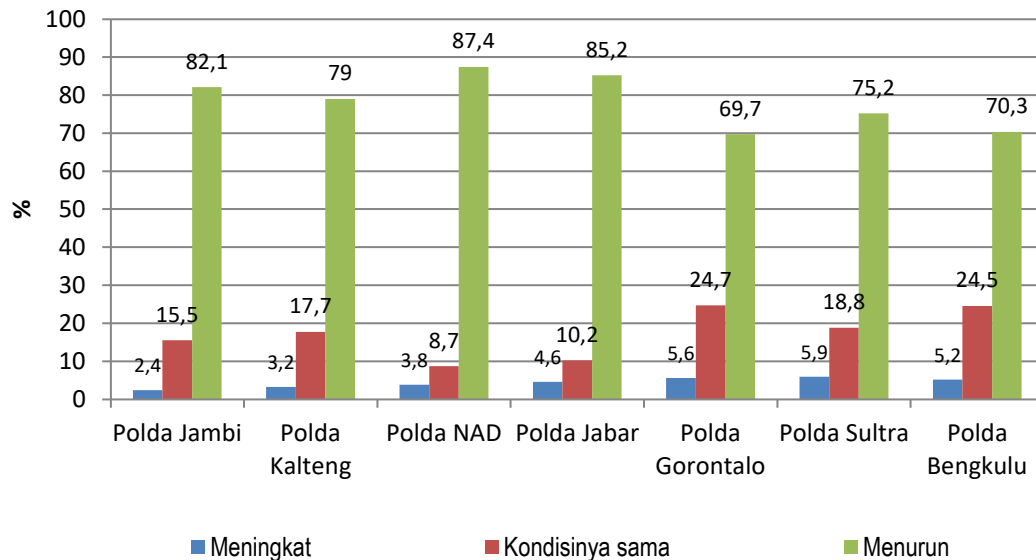
Grafik 4.9.
Kehadiran Bhabinkamtibmas menjadikan masyarakat
merasakan situasi aman



Sumber : Data kuesioner penelitian

Kehadiran Bhabinkamtibmas juga dirasakan dapat menurunkan tindak kejahatan/kriminal di desa/kelurahan. Kehadiran personel Kepolisian yang berseragam setiap hari merupakan dambaan warga masyarakat terutama di desa-desa yang rawan tindak kriminalitas. Grafik 4.10 berikut ini memberikan fakta bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan karena dapat menurunkan tindak kejahatan, hal ini terlihat dari angka persentase responden warga masyarakat di atas 70% yang menyatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas dapat menurunkan tindak kejahatan.

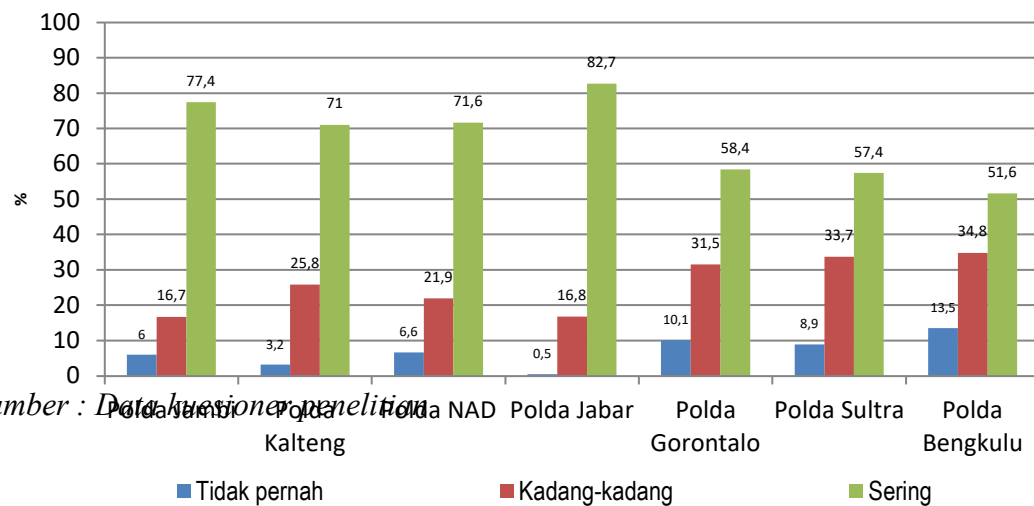
Grafik 4.10.
Pengaruh kehadiran Bhabinkamtibmas terhadap menurunnya
tindak kejahatan/kriminal



Sumber : Data kuesioner penelitian

Pelayanan Bhabinkamtibmas tidak hanya di bidang keamanan saja tetapi juga di bidang lain termasuk musibah atau bencana yang dihadapi warga masyarakat. Pertolongan Bhabinkamtibmas terhadap musibah warga belum dikenal meluas oleh warga masyarakat terutama di Polda Bengkulu, Polda Sultra dan Polda Gorontalo. Hal ini terlihat pada grafik 4.11, terlihat masih dibawah 60% responden warga masyarakat yang mengemukakan bahwa Bhabinkamtibmas memberikan pertolongan/pelayanan/bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Peran Bhabinkamtibmas seperti ini belum pernah didengar oleh warga masyarakat.

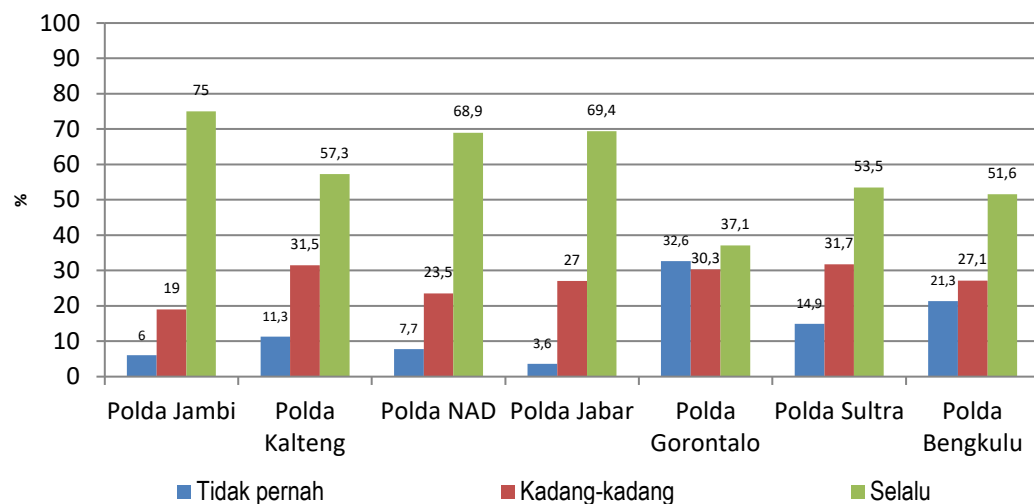
Grafik 4.11.
Bhabinkamtibmas memberikan pertolongan/pelayanan/bantuan kepada warga ketika
mendapatkan musibah yang membutuhkan bantuan Polisi



Sumber : Data kuesioner penelitian

Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam pembentukan Siskamling tidak begitu merata di setiap Polda lokasi penelitian. Grafik 4.12 memperlihatkan Bhabinkamtibmas di Polda Jambi, Polda Jabar dan Polda NAD cukup intensif dalam pembentukan Siskamling, hal ini dinyatakan oleh responden warga masyarakat di ketiga Polda tersebut (Polda Jambi 75%, Polda Jabar 69,4%, dan Polda NAD 68,9%). Sedangkan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam pembentukan Siskamling dapat dikatakan masih kurang optimal, karena angka persentase responden warga masyarakat yang berpendapat keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam pembentukan Siskamling dibawah 60%, yaitu Polda Kalteng 57,3%, Polda Sultra 53,5%, Polda Bengkulu 51,6%, dan Polda Gorontalo 37,1%.

Grafik 4.12.
Partisipasi Bhabinkamtibmas dalam pembentukan Siskamling



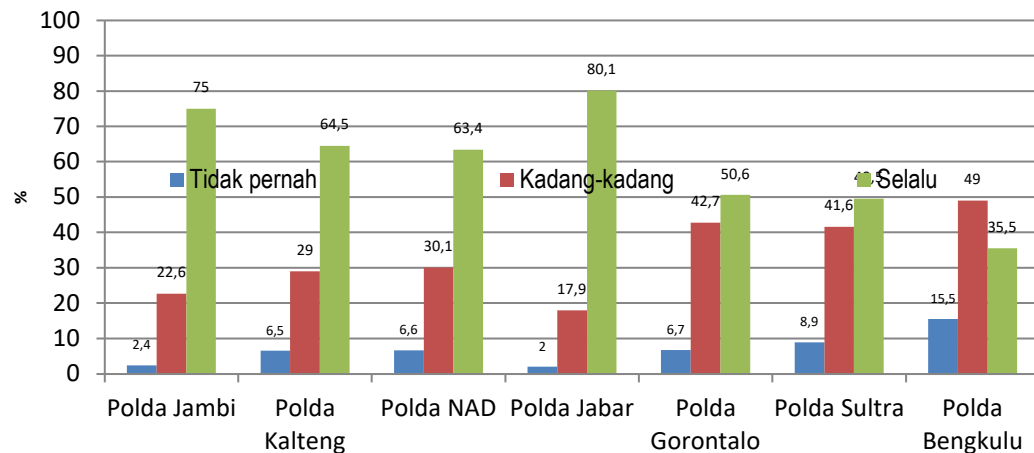
Sumber : Data kuesioner penelitian

3. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Mediator dan Fasilitator

Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator dan fasilitator dapat dilihat dari sejauhmana Bhabinkamtibmas membantu perselisihan antar warga masyarakat sehingga tidak perlu diproses menjadi laporan Polisi. Disini peranan Bhabinkamtibmas sangat besar dalam membantu penyelesaian sosial bersama dengan Kepala Desa/Lurah dan tokoh adat/agama. Jika melihat grafik 4.13 menunjukkan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat, menonjol di Polda Jabar dan Polda Jambi, hal ini dinyatakan oleh responden warga masyarakat di kedua Polda tersebut (Polda Jabar 80,1%, Polda Jambi 75%). Sementara di Polda Kalteng dan Polda NAD, Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat dapat dikatakan cukup, masing-masing angka persentase jumlah responden warga masyarakat yang berpendapat bahwa Bhabinkamtibmas ikut membantu permasalahan di masyarakat, yakni 64,5% dan 63,4%. Sedangkan angka persentase responden warga masyarakat

yang menyatakan Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat tidak begitu besar terjadi di Polda Gorontalo 50,6%, Polda Sultra 49,5% dan Polda Bengkulu 35,5%.

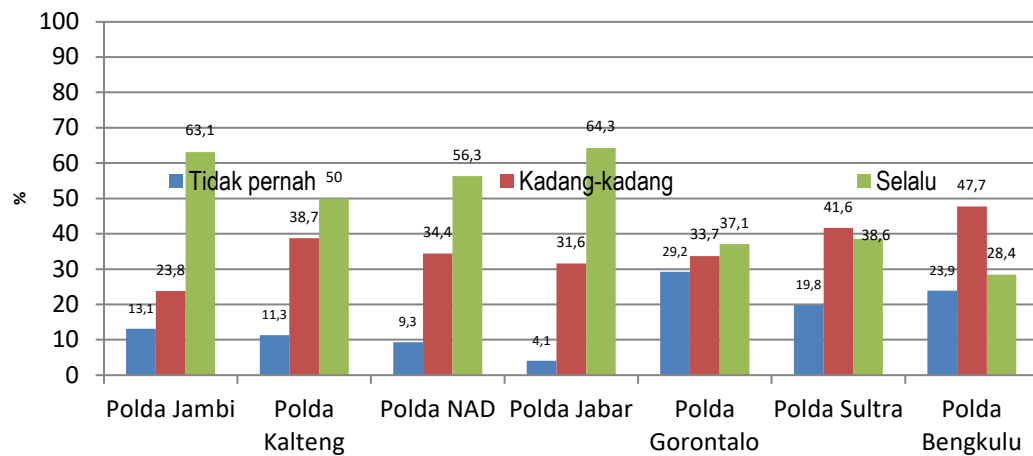
Grafik 4.13.
Bhabinkamtibmas membantu menangani permasalahan /perselisihan antar warga



Sumber : Data kuesioner penelitian

Jika pada grafik 4.13 di atas lebih mengungkapkan peran Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat tanpa melalui FKPM, maka pada grafik 4.14 Bhabinkamtibmas melalui FKPM menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan grafik 4.14 ini terlihat peran Bhabinkamtibmas semakin mengecil. Di Polda Jabar misalnya, responden yang mengemukakan Bhabinkamtibmas dalam membantu permasalahan di masyarakat melalui FKPM hanya 64,3%, padahal jika dibandingkan tanpa FKPM sekitar 80%. Penurunan ini terjadi di semua Polda lokasi penelitian, yaitu Polda Jambi (75% → 63,1%), Polda Kalteng (64,5% → 50%), Polda NAD (63,4% → 56,3%), Polda Gorontalo (50,6% → 37,1%), Polda Sultra (49,5% → 38,6%), dan Polda Bengkulu (35,5% → 28,4%). Mengapa hal ini terjadi ? Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW/RT, dan tokoh adat/ masyarakat dapat diketahui bahwa tidak semua desa/kelurahan terdapat FKPM atau desa/kelurahan pernah terbentuk FKPM tetapi sekarang tidak lagi aktif karena alasan biaya operasional.

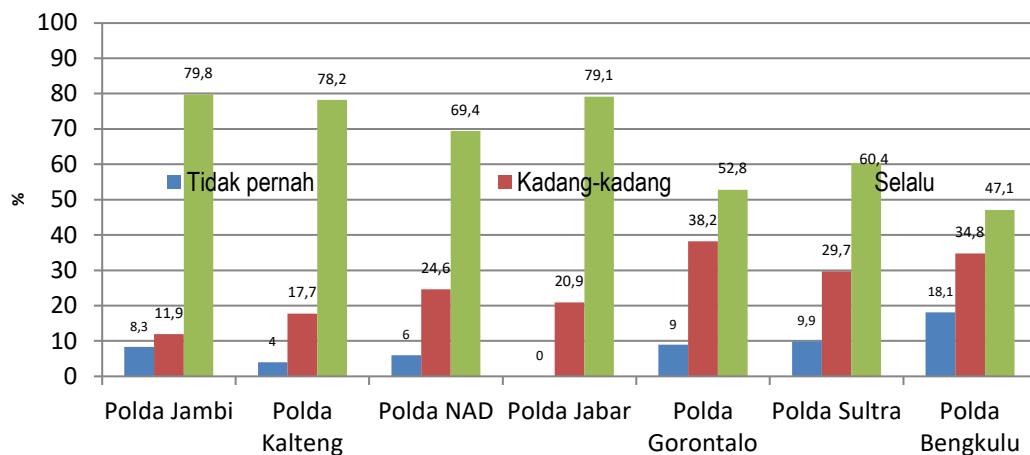
Grafik 4.14.
Bhabinkamtibmas menangani permasalahan warga melalui FKPM dengan cara yang tidak melanggar hukum



Sumber : Data kuesioner penelitian

Di dalam keaktifan Bhabinkamtibmas juga memberikan petunjuk atau arahan bila terjadi tindak kejahatan. Dari grafik 4.15 terlihat angka persentase jumlah respondenwarga masyarakat cukup besar yang berpendapat bahwa Bhabinkamtibmas telah memberikan petunjuk/arahan bila terjadi tindak kriminal, yaitu Polda Jambi 79,8%, Polda Jabar 79,1%, Polda Kalteng 78,2%, Poda NAD 69,4%, dan Polda Sultra 60,4%. Sedangkan di Polda Gorontalo dan Polda Bengkulu, persentase jumlah responden warga masyarakat yang mengemukakan bahwa Bhabinkamtibmas memberikan petunjuk atau arahan bila terjadi tindak kriminal sekitar 50%, yakni masing-masing 52,8% dan 47,1%.

Grafik 4.15.
Bhabinkamtibmas memberikan petunjuk/arahan bila terjadi tindak kejahatan/kriminal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

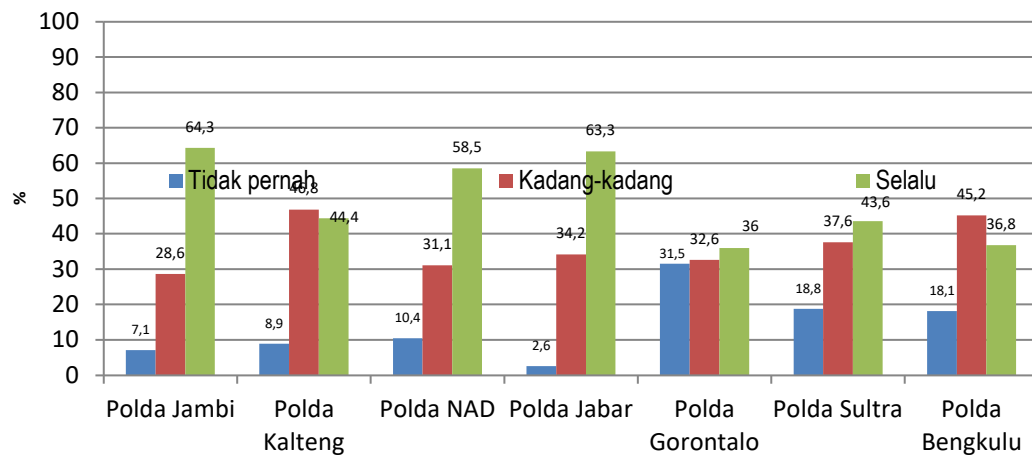


Sumber : Data kuesioner penelitian

4. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Dinamisator dan Motivator

Bhabinkamtibmas dianggap masih belum optimal melakukan tugas mengontrol kegiatan Siskamling di desa/kelurahan yang menjadi binaannya. Sedikit sekali responden warga masyarakat di semua Polda lokasi penelitian yang mengemukakan bahwa Bhabinkamtibmas telah menjalankan tugas menggiatkan Siskamling. Grafik 4.16 secara jelas memperlihatkan tidak ada angka persentase jumlah responden masyarakat yang besar yang menunjukkan peran Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan Siskamling. Secara berurutan persentase jumlah responden warga masyarakat di ketujuh Polda sebagai berikut : Polda Jambi 64,3%, Polda Jabar 63,3%, Polda NAD 58,5%, Polda Kalteng 44,3%, Polda Sultra 43,6%, Polda Bengkulu 36,8%, dan Polda Gorontalo 36%. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat kecil di dalam menggerakkan atau menggiatkan dan melakukan Siskamling desa/kelurahan yang menjadi binaannya.

Grafik 4.16.
Bhabinkamtibmas menggerakkan/menggiatkan dan melakukan kontrol Siskamling

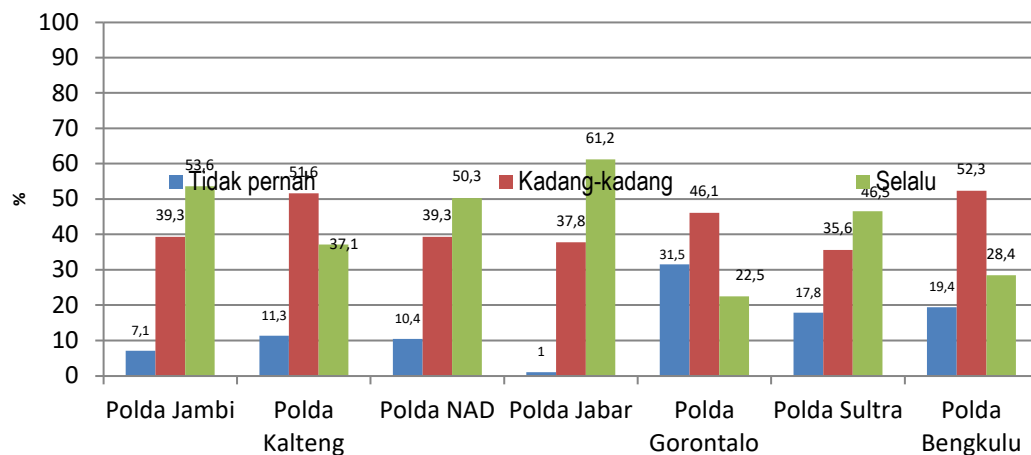


Sumber : Data kuesioner penelitian

Tidak jauh berbeda dengan peran Bhabinkamtibmas dalam mendorong kegiatan Siskamling, dalam kasus peran Bhabinkamtibmas dalam menggiatkan kegiatan positif lainnya di masyarakat dianggap masih belum optimal. Grafik 4.17 memperlihatkan tidak ada angka persentase jumlah responden warga masyarakat yang besar yang menunjukkan peran Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan kegiatan sosial positif di masyarakat. Secara berurutan persentase jumlah responden warga masyarakat di ketujuh Polda sebagai berikut : Polda Jabar 61,2%, Polda Jambi 53,6%,

Polda Kalteng 51,6%, Polda NAD 50,3%, Polda Sultra 46,5%, Polda Bengkulu 28,4%, Polda Gorontalo 22,1%. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat kecil di dalam menggerakkan kegiatan positif masyarakat di desa/kelurahan yang menjadi binaannya.

Grafik 4.17.
Bhabinkamtibmas menggerakkan/menggiatkan kegiatan sosial lainnya yang positif terhadap masyarakat

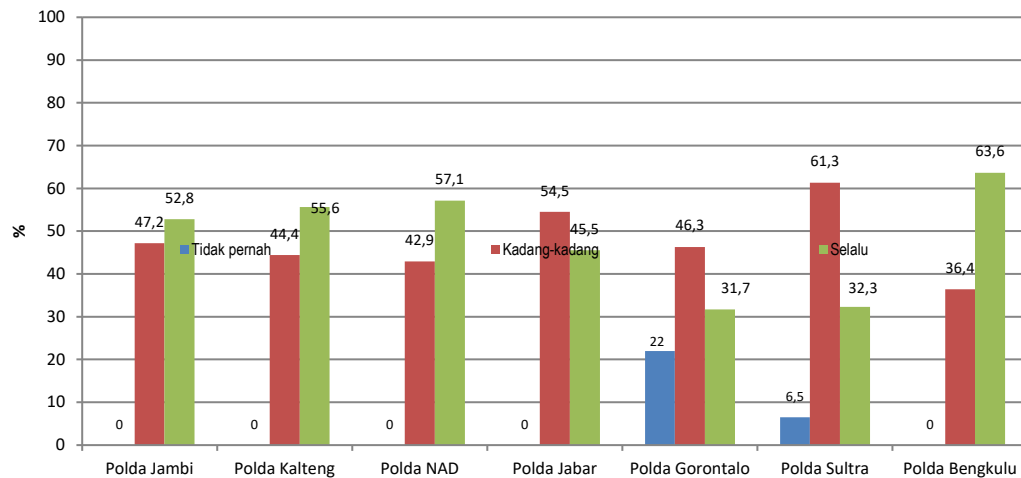


Sumber : Data kuesioner penelitian

5. Peran Bhabinkamtibmas dalam Pulbaket

Dari grafik 4.18 terlihat bahwa Bhabinkamtibmas belum optimal dalam pembuatan laporan gangguan Kamtibmas kepada pimpinan. Angka persentase jumlah responden yang selalu membuat laporan Kamtibmas kepada pimpinan paling besar sekitar 60%. Jika diurutkan angka persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mengaku membuat laporan gangguan Kamtibmas paling besar 63,6% di Polda Bengkulu, kemudian disusul Polda Sultra 61,3%, Polda NAD 57,1%, Polda Kalteng 55,6%, Polda Jabar 54,5%, Polda Jambi 52,8%, dan Polda Gorontalo 31,7%. Ini artinya bahwa Bhabinkamtibmas sangat sedikit yang membuat laporan gangguan Kamtibmas dan melaporkan kepada pimpinan.

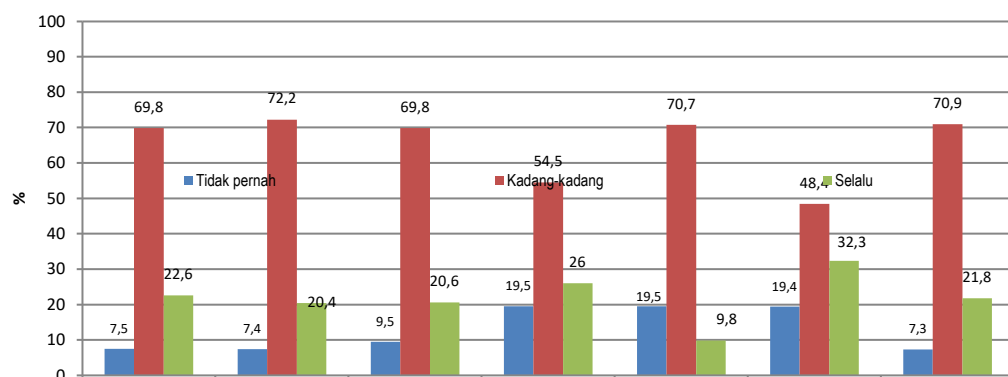
Grafik 4.18.
Bhabinkamtibmas membuat laporan informasi gangguan Kamtibmas kepada pimpinan



Sumber : Data kuesioner penelitian

Tidak jauh berbeda dengan temuan pada grafik 4.18, dari survei terhadap responden Bhabinkamtibmas menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan. Pertanyaan yang diajukan kepada responden personel Bhabinkamtibmas tentang kegiatan mengup-date data atau pembaharuan data yang dikumpulkan di masyarakat, terlihat pada grafik 4.19 persentase jumlah responden sangat kecil yang menjawab selalu melakukan up-date data atau pembaharuan data yang dikumpulkan di masyarakat. Secara berurutan persentase jumlah Bhabinkamtibmas mulai yang paling kecil persentasenya, yakni: Polda Gorontalo 9,8%, Polda Kalteng 20,4%, Polda NAD 20,6%, Polda Bengkulu 21,8%, Polda Jambi 22,6%, Polda Jabar 26,0%, dan Polda Sultra 32,3%.

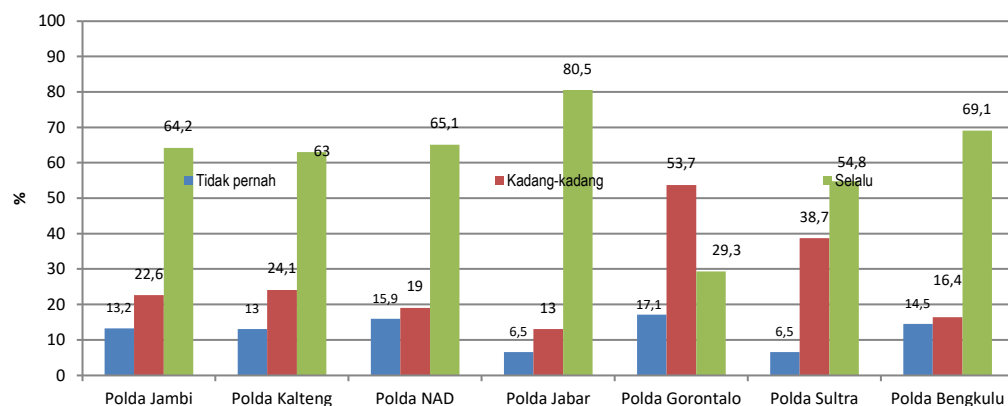
Grafik 4.19.
Bhabinkamtibmas melakukan update/ pembaharuan data masyarakat



Sumber : Data kuesioner penelitian

Koordinasi dengan Babinsa adalah salah satu upaya Bhabinkamtibmas melaksanakan Pulbaket. Namun demikian dari hasil survei menunjukkan belum semua Bhabinkamtibmas melakukan koordinasi dengan Babinsa, hal ini terlihat pada grafik 4.20, yang menunjukkan adanya tingkat koordinasi yang tidak sama dilakukan di antara Bhabinkamtibmas dengan Babinsa. Di Polda Jabar, persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas sekitar 80,5%, hal ini berarti Bhabinkamtibmas di Polda Jabar cukup intensif melakukan koordinasi dengan Babinsa. Di lain pihak, di Polda Gorontalo, angka persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang menjalin koordinasi dengan Babinsa sekitar 29,3%, hal ini menggambarkan bahwa Bhabinkamtibmas di Polda Gorontalo jarang melakukan koordinasi dengan Babinsa. Sementara itu, untuk Polda-Polda lainnya selalu melaksanakan koordinasi.

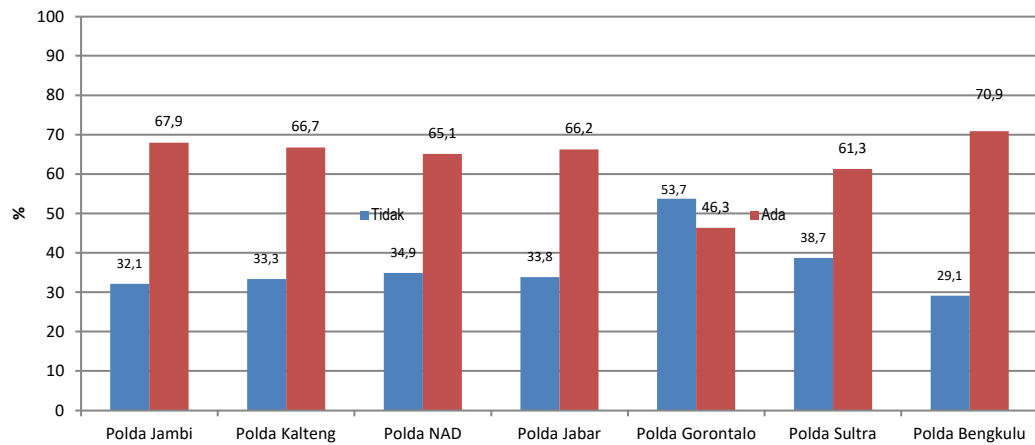
Grafik 4.20.
Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan Babinsa di desa/ kelurahan binaannya



Sumber : Data kuesioner penelitian

Penggunaan jadwal untuk tugas rutin Bhabinkamtibmas belum maksimal dilakukan. Ada sekitar 40% sampai 30% responden Bhabinkamtibmas yang mengaku tidak pernah membuat jadwal sebagai pedoman dalam melakukan tugas rutin. Angka persentase jumlah Bhabinkamtibmas yang mengaku telah memiliki jadwal sebagai pedoman dalam menjalankan tugas rutin tidak terlalu besar, yakni berkisar antara 60% sampai 71% responden. Kecenderungan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari temuan FGD dengan personel Bhabinkamtibmas, bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan hanya dapat dilakukan jika tidak menjalankan tugas pokok atau jika mendapat undangan atau panggilan Kepala Desa/Lurah.

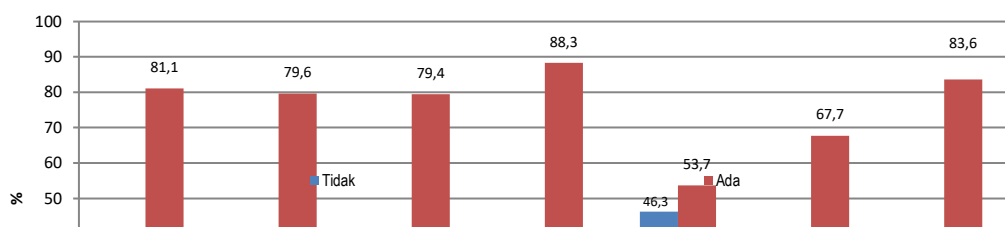
Grafik 4.21.
Bhabinkamtibmas memiliki jadwal kegiatan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas rutin



Sumber : Data kuesioner penelitian

Meskipun Bhabinkamtibas belum optimal dalam pembuatan jadwal dalam tugas rutin, namun dalam kaitannya dengan penggunaan buku saku (buku mutasi kegiatan dalam menjalankan tugas rutin) menunjukkan kecenderungan yang baik, kecuali di Polda Gorontalo. Ada sekitar 53,7% responden Bhabinkamtibmas di Polda Gorontalo yang mengaku telah memiliki buku saku. Sementara itu, Polda-Polda lain menunjukkan hal yang berbeda, hal ini terlihat pada grafik 4.22, yakni sebagian besar responden Bhabinkamtibmas mengaku telah memiliki buku saku, yaitu 88,3% responden Bhabinkamtibmas di Polda Jabar, 83,6% responden Bhabinkamtibmas di Polda Bengkulu, 81,1% responden Bhabinkamtibmas di Polda Jambi, 79,6% responden Bhabinkamtibmas di Polda Kalteng, 79,4% responden Bhabinkamtibmas di Polda NAD, 67,7% responden Bhabinkamtibmas di Polda Sultra.

Grafik 4.22.
Bhabinkamtibmas memiliki buku mutasi kegiatan / buku saku dalam menjalankan tugas rutin

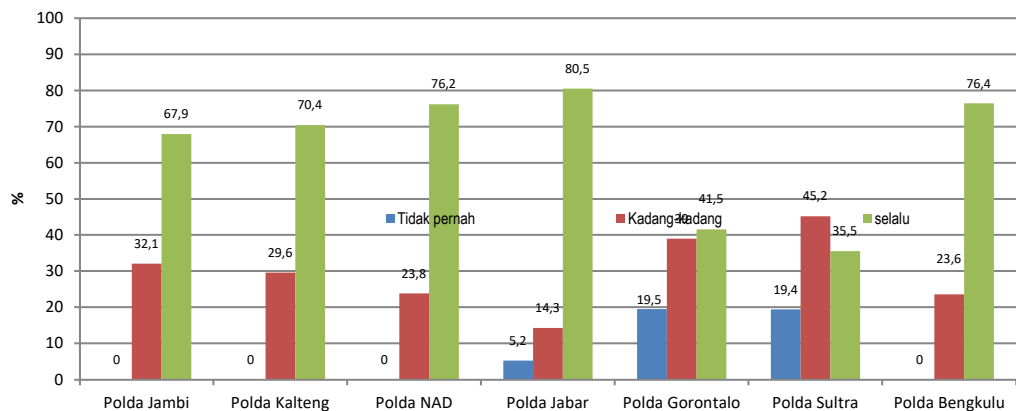


Sumber : Data kuesioner penelitian

Terkait dengan pembuatan laporan mingguan dapat disampaikan bahwa Bhabinkamtibmas di Polda Sultra dan Polda Gorontalo merupakan Polda yang menunjukkan Bhabinkamtibmas sangat minim dalam pembuatan laporan mingguan, hal ini terlihat pada grafik 4.23 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 41,5% responden Bhabinkamtibmas di Polda Gorontalo, 35,5% responden Bhabinkamtibmas di Polda Sultra yang mengaku telah membuat laporan mingguan dalam tugasnya. Ini artinya, sekitar 58,5% dan 64,5% responden Bhabinkamtibmas yang tidak rutin membuat laporan mingguan atas kegiatan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya.

Sementara itu, Polda-Polda yang menunjukkan keaktifan Bhabinkamtibmas dalam pembuatan laporan mingguan terjadi di Polda Jabar 80,5%, Polda Bengkulu 76,4%, Polda NAD 76,2%, Polda Kalteng 70,4%, dan Polda Jambi 67,9%. Buku mutasi kegiatan merupakan kewajiban Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, karena itu jika mengacu dari hasil survei sebagaimana terdapat pada grafik 4.23 dimana masih belum merata kedisiplinan Bhabinkamtibmas merupakan indikasi ada persoalan dalam kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya.

Grafik 4.23.
Bhabinkamtibmas membuat laporan mingguan



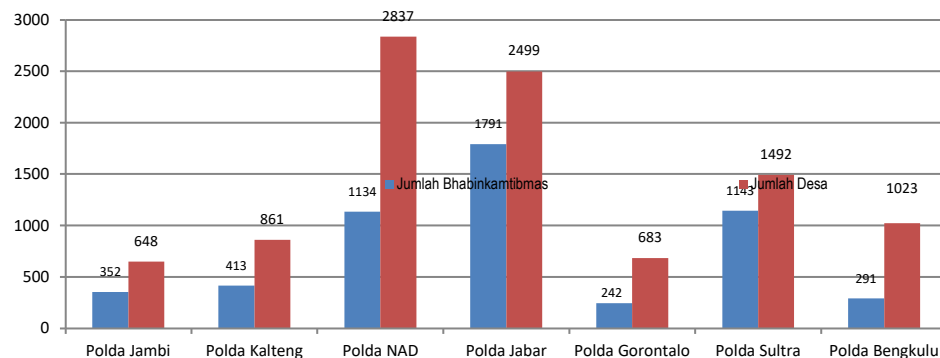
Sumber : Data kuesioner penelitian

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas

Uraian di bawah ini akan membahas faktor-faktor yang dapat memberikan kejelasan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi terkait dengan peran-peran Bhabinkamtibmas.

Pertama, adalah rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa/kelurahan yang paling tajam terjadi di Polda Bengkulu, yakni sekitar 1:4, sedangkan rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa/kelurahan yang mendekati ideal (1:1) adalah Polda Sultra, Polda Jambi, dan Polda Jabar. Sedangkan Polda-Polda lainnya berkisar antara 1:2 dan 1:3. Rasio antara jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan ini memberikan penjelasan bahwa personel Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada. Dari FGD dengan para Kasat Binmas di Polres bahwa Polri telah mengeluarkan kebijakan penempatan desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan. Kategori desa ini berdasarkan tingkat kerawanan. Jadi dengan demikian, satu Bhabinkamtibmas diharapkan dapat hadir di setiap desa binaannya.

Grafik 4.24.
Rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa pada tahun 2012



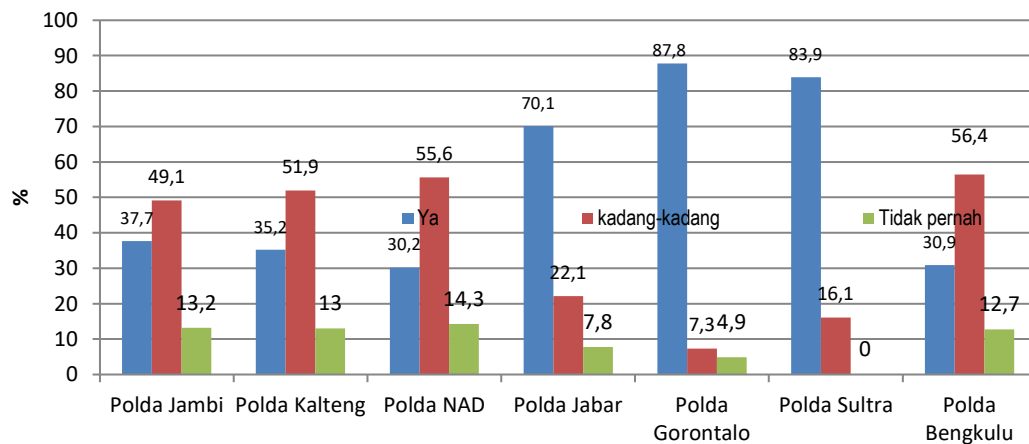
Sumber : Data sekunder penelitian

Kedua, adalah tugas rangkap dan tugas tambahan. Grafik 4.25 dan grafik 4.26 memberikan sebuah fakta bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan dan tugas rangkap. Semua responden Bhabinkamtibmas di ketujuh Polda menyatakan memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan.

Persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas tambahan paling banyak terdapat Polda Gorontalo 87,8%, Polda Sultra 83,9%, dan Polda Jabar 70,1%. Sedangkan Polda-Polda lainnya, persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas berkisar kurang lebih 50%. Sementara itu, persentase jumlah pengakuan responden Bhabinkamtibmas yang merasa memiliki tugas rangkap kecenderungannya tidak jauh berbeda dengan tugas tambahan.

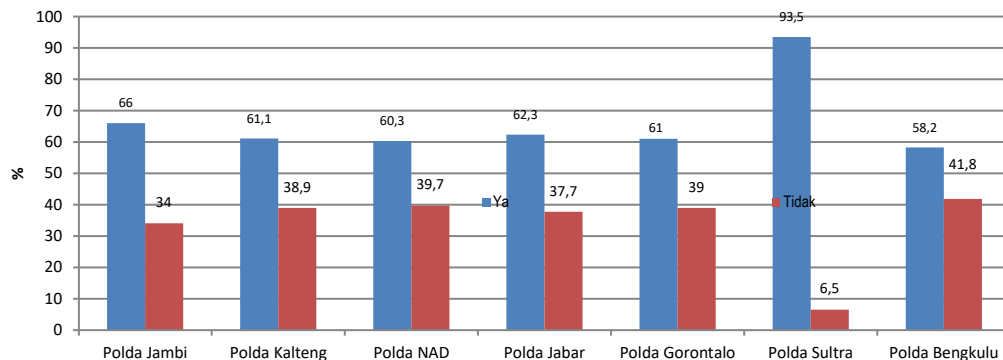
Grafik 4.26 memperlihatkan persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas rangkap, paling besar terdapat di Polda Sultra 93,5%, sedangkan Polda-Polda lainnya, persentase jumlah responden berkisar kurang lebih 60%. Sekitar separuh lebih jumlah Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas rangkap dan tambahan menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas tidak bisa berjalan secara optimal. Meskipun Bhabinkamtibmas telah ditunjuk mengemban tugas di desa binaannya, akan tetapi tugas tidak dapat dijalankan setiap hari karena memiliki tugas rangkap dan tugas tambahan. FGD dengan para Kapolsek dapat diperoleh penjelasan bahwa didalam menghadapi tugas rangkap atau tambahan, Bhabinkamtibmas lebih mengutamakan tugas pokok sebagai anggota Polsek atau dengan kata lain kehadiran di desa/kelurahan dapat dilakukan sepanjang tidak sedang mengerjakan tugas pokok di Polsek.

Grafik 4.25.
Tugas tambahan



Sumber : Data kuesioner penelitian

Grafik 4.26.
Tugas rangkap

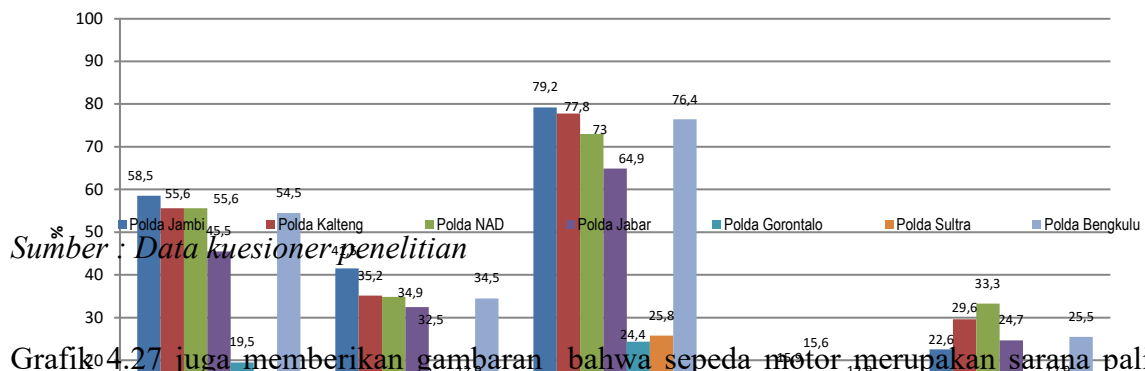


Sumber : Data kuesioner penelitian

Ketiga, dukungan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya. Faktor dukungan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap peran Bhabinkamtibmas. Grafik 4.27 menunjukkan persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mengaku mendapat dukungan operasional paling besar 58,5 % di Polda Jambi, sedangkan paling kecil terdapat di Polda Sultra yaitu 9,7%.

Begitu pula dukungan pulsa dan sarana kamera sangat minim sekali. Persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mengaku mendapat dukungan peralatan kamera di ketujuh Polda lokasi penelitian berkisar antara 2,4% sampai 15,6%. Sedangkan persentase jumlah responden yang mengaku mendapat bantuan pulsa di ketujuh Polda berkisar antar 0% sampai 33,3%. Jadi dengan demikian, dukungan kamera diberikan kepada Bhabinkamtibmas maksimal 15% dari jumlah personel Bhabinkamtibmas dan 33,3% atau sepertiga persen dari jumlah Bhabinkamtibmas.

Grafik 4.27.
Dukungan sarana dan prasarana



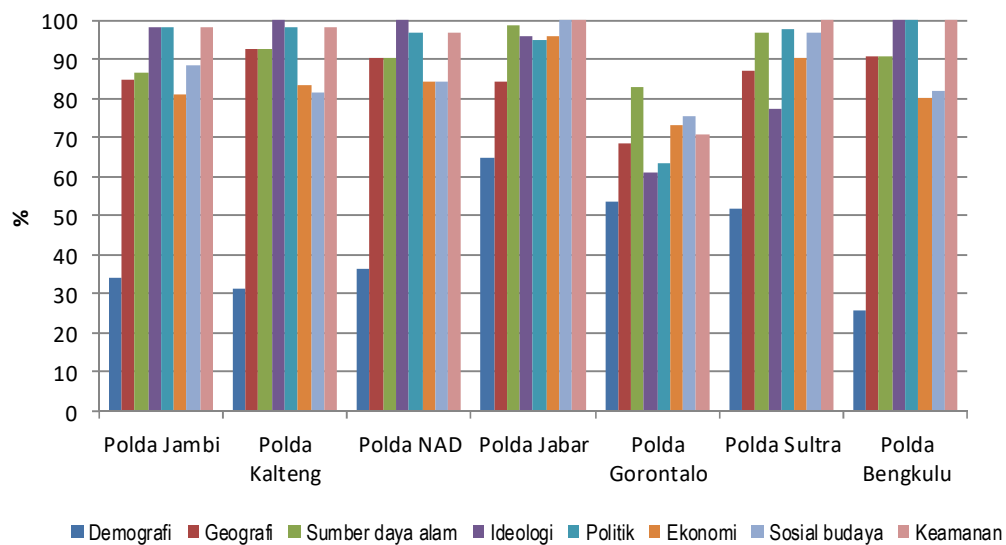
Grafik 4.27 juga memberikan gambaran bahwa sepeda motor merupakan sarana paling dominan yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam mengunjungi desa/kelurahan, terutama di Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda NAD, Polda Jabar, dan Polda Bengkulu. Namun demikian, grafik tersebut tidak mencerminkan seluruhnya sepeda motor bantuan dinas, melainkan kendaraan pribadi. Hasil FGD menunjukkan bahwa sarana kendaraan sepeda motor yang digunakan Bhabinkamtibmas pada umumnya milik pribadi, tidak semua Bhabinkamtibmas mendapat bantuan sepeda motor dinas.

Bhabinkamtibmas tidak selalu menggunakan kendaraan sepeda motor dalam berkunjung desa/kelurahan tetapi menggunakan kendaraan patroli, hal ini tercermin di Polda Sultra dan Polda NAD, yang menunjukkan angka persentase jumlah Bhabinkamtibmas yang menggunakan sarana kendaraan sepeda motor sangat kecil, yaitu 24,4% dan 25,8%.

Keempat, adalah pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Trigatra dan Pancagatra desa/kelurahan. Jika melihat hasil survei sebagaimana terlihat pada grafik 4.28, tingkat pengetahuan Bhabinkamtibmas menunjukkan baik. Semua responden Bhabinkamtibmas

mengaku telah memahami Trigatra dan Pancagatra, kecuali aspek demografi kurang dipahami sebagian besar responden Bhabinkamtibmas. Sedangkan gatra yang lain (politik, geografi, ekonomi, sumberdaya alam, sosial-budaya, ideologi dan keamanan), telah dipahami oleh kurang lebih sekitar 80% responden Bhabinkamtibmas di ketujuh Polda lokasi penelitian.

Grafik 4.28.
Pengetahuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas

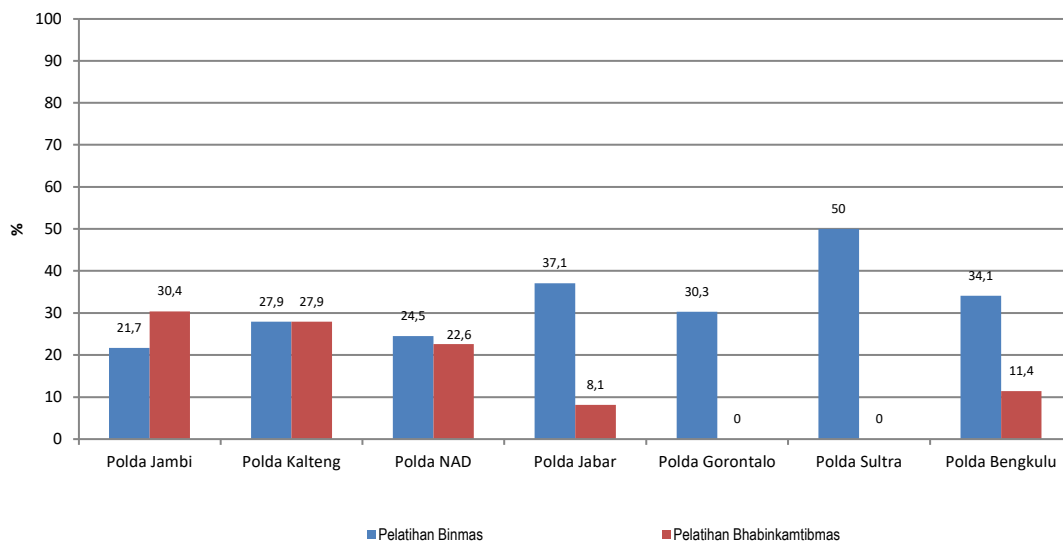


Sumber : Data kuesioner penelitian

Kelima, adalah pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas yang pernah diikuti. Berdasarkan hasil survei terhadap responden Bhabinkamtibmas sebagaimana terlihat pada grafik 4.29 menunjukkan Bhabinkamtibmas sangat minim sekali mendapatkan pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas. Untuk pelatihan Binmas, persentase paling rendah dari jumlah responden Bhabinkamtibmas yang pernah mendapatkan pelatihan ini sekitar 21,7% (Polda Jambi), sedangkan persentase tertinggi dari jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mendapatkan pelatihan Binmas sekitar 50% (Polda Sultra). Sedangkan untuk pelatihan Bhabinkamtibmas lebih memprihatinkan lagi. Di Polda Sultra dan Polda Gorontalo, tidak ada responden Bhabinkamtibmas yang mengaku pernah mendapatkan pelatihan Bhabinkamtibmas, di lain pihak angka persentase dari jumlah responden yang mengaku pernah mendapatkan pelatihan Bhabinkamtibmas sekitar 30,4% (Polda Jambi). Untuk Polda-Polda lainnya, angka

persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mendapatkan pelatihan Bhabinkamtibmas berada di bawah 30%, yaitu Polda Kalteng 27,9%, Polda NAD 22,6%, Polda Bengkulu 11,4%, dan Polda Jabar 8,1%.

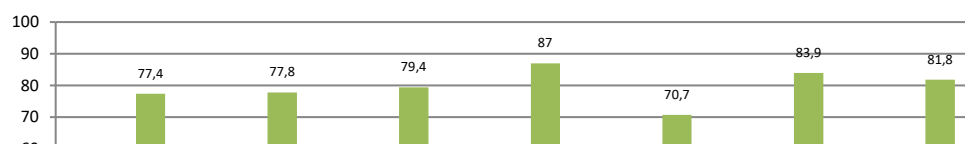
Grafik 4.29.
Pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas



Sumber : Data kuesioner penelitian

Keenam, adalah peranan Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas. Menurut pengakuan responden Bhabinkamtibmas bahwa pimpinan selalu melakukan Wasdal tugas-tugas Bhabinkamtibmas. Grafik 4.30 memperlihatkan angka persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mengatakan pimpinan selalu melakukan Wasdal tugas Bhabinkamtibmas cukup besar di tujuh Polda lokasi penelitian, yakni berkisar 70% sampai 87%.

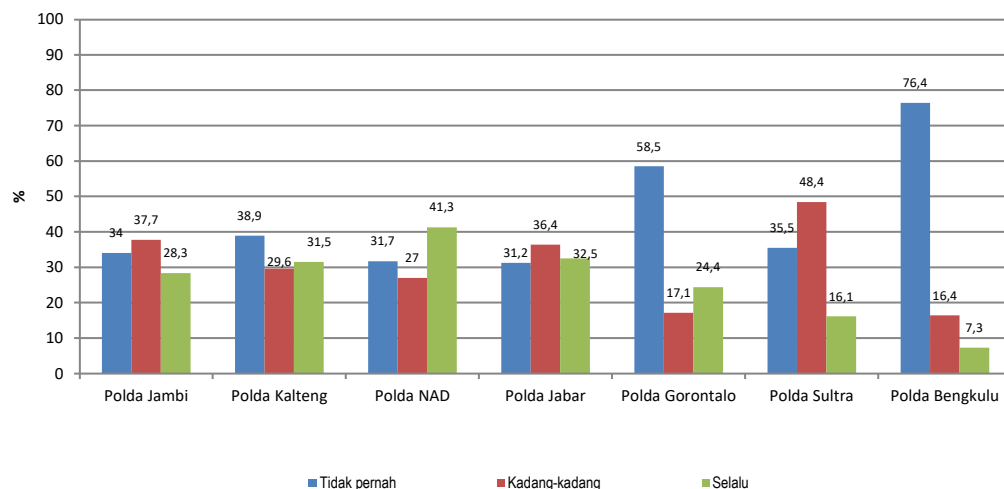
Grafik 4.30.
Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas



Sumber : Data kuesioner penelitian

Namun demikian, hasil survei tentang Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas yang menunjukkan hasil yang baik tetapi tidak diikuti oleh pemberian *rewards* dan *punishment*. Grafik 4.31 menunjukkan sebagian kecil responden Bhabinkamtibmas yang mengaku selalu diberikan *rewards* dan *punishment* oleh pimpinan. Angka persentase jumlah responden Bhabinkamtibmas yang mengaku selalu diberikan *rewards* dan *punishment* oleh pimpinan paling besar sekitar 41,3% dan paling rendah sekitar 7,3%. Jadi dengan demikian, perhatian pimpinan terhadap petugas Bhabinkamtibmas belum optimal.

Grafik 4.31.
Pemberian rewards dan punishment dari pimpinan



Sumber : Data kuesioner penelitian

D. Temuan FGD

1. Kedatangan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan pada umumnya tidak rutin setiap hari. Keterbatasan jumlah personel Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah

desa/kelurahan adalah alasan klasik tidak optimalnya kehadiran Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas tidak bisa menyambangi desa/kelurahan setiap hari. Pengakuan Bhabinkamtibmas mengunjungi desa/kelurahan dilakukan pada saat jam piket atau kesempatan patroli. Meskipun Bhabinkamtibmas tidak dapat hadir setiap hari, Bhabinkamtibmas berkomunikasi lewat telepon/HP.

Polda yang dapat dijadikan contoh model inovasi dalam membangun pola komunikasi Bhabinkamtibmas dan masyarakat. Terobosan kreatif yang dilakukan di beberapa Polres/ta pada dasarnya adalah upaya kegiatan untuk para Bhabinkamtibmas lebih aktif berperan dan tidak sekedar memberikan penyadaran masyarakat tentang Kamtibmas tetapi sebagai bagian bentuk pelayanan kepada masyarakat di tingkat pedesaan.

2. Tugas rangkap Bhabinkamtibmas sebagai anggota Dalmas, petugas SPK Polsek, dan fungsi-fungsi lain di Polsek merupakan kendala ketidakhadiran setiap hari di desa/kelurahan. Selain itu, mutasi Bhabinkamtibmas juga berpengaruh pada-pola komunikasi yang telah terjalin dengan baik. Permasalahan seperti ini sangat menyulitkan peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di masa depan.
3. Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam bentuk sambang warga (*door to door*) terbatas dilakukan karena faktor luas wilayah desa/kelurahan. Namun demikian, beberapa Polda berhasil mengembangkan program kegiatan dalam rangka membangun komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.

a. Polda Aceh

Komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat di Polda Aceh telah dicanangkan melalui program kegiatan “Polisi saweu sikula” (Polisi berkunjung ke sekolah), “Polisi saweu kede kopi” (Polisi ngrumpi di warung kopi), Polmas dan ketokohan, serta Tribrata dan perilaku Islami. Beberapa kegiatan yang terkait dengan program Polda Aceh tersebut, antara lain menjelaskan perihal penerimaan anggota Polri kepada pelajar dan menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan bertatap muka dengan tokoh-tokoh agama.

b. Polda Kalteng

Di jajaran Polda Kalimantan Tengah tengah dikembangkan program peningkatan peran Bhabinkamtibmas, yang disebut “Program Guru Bantu Penggelaran 1 Polisi 1 desa/kelurahan”, dengan mengambil percontohan di Polres Kota Waringin Timur, Polres Barito Selatan, dan Pulang Pisau. Dari sisi Polri, program bertujuan mendekatkan diri ke masyarakat dan membangun citra Polisi di masyarakat melalui bidang pengabdian di bidang pendidikan, yaitu membantu sekolah dasar di daerah terpencil yang kekurangan guru. Bhabinkamtibmas yang sudah dilatih terlebih dahulu diharapkan mampu mengajar di depan kelas, yang diprioritaskan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Polres yang menjadi percontohan telah mendatangi MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Selain hal tersebut, Direktorat Binmas Polda Kalteng pada bulan Juni 2013 juga akan memperluas peran Bhabinkamtibmas di bidang sosialkeagamaan, yaitu program “Pembarita

Wonglewu”, atau pemberita bagi masyarakat desa/kelurahan, yang intinya seorang Bhabinkamtibmas dapat menjadi contoh tauladan bagi masyarakat.

4. Bhabinkamtibmas selalu hadir pada setiap kegiatan yang diadakan desa/kelurahan terutama yang berhubungan dengan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di Polda Aceh. Penerimaan masyarakat terhadap kehadiran Bhabinkamtibmas terkait dengan konflik masa lalu di Aceh sudah tidak ada lagi. Kehadiran Bhabinkamtibmas atau personelKepolisian telah menjadi kebutuhan masyarakat Aceh. Hanya sebagian kecil masyarakat yang “traumatik” dengan kehadiran petugas Kepolisian karena warisan masa lalu.
5. Perangkat desa/kelurahan selalu memberikan kesempatan berbicara dalam berbagai pertemuan. Namun sebaliknya, Bhabinkamtibmas hampir tidak pernah berkoordinasi dengan perangkat desa/kelurahan untuk meminta waktu melakukan pertemuan, kecuali pertemuan yang diadakan oleh Polsek atau Polres/ta.
6. Bhabinkamtibmas cukup aktif melakukan kegiatan lain, misalnya menggiatkan Siskamling; membantu evakuasi bencana alam/banjir; memberikan penyuluhan hukum dalam berbagai kesempatan; ikut menangani kenakalan remaja. Penyelesaian kasus konflik antar warga yang bersumber dari masalah pencemaran udara akibat kotoran ternak.
7. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran atau penampakan fisik Bhabinkamtibmas karena dirasakan masyarakat dapat memberikan rasa aman dan menutup peluang tindak kejahatan di masyarakat.
8. Dari FGD dengan Kepala Desa/Lurahterkesan mereka belum memahami kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas terutama minimnya anggaran transportasi Bhabinkamtibmas untuk mengunjungi desa/kelurahan binaan, meskipun demikian ada beberapa desa/kelurahan yang memberikan kontribusi kegiatan Bhabinkamtibmas, seperti pembangunan Balai FKPM dan penyediaan ruangan kerja bagi Bhabinkamtibmas di kantor desa/kelurahan. Begitu pula, menurut kalangan Kepala Desa/Lurah, bahwa belum seluruh warga masyarakat mengerti dan memahami kehadiran Bhabinkatibmas di desa/kelurahannya.
9. Perlu penyuluhan hukum pada masyarakat desa/kelurahan yang masih kuat memegang hukum adat untuk mengatasi konflik kepentingan antara hukum adat dan posisi hukum nasional. Dari berbagai FGD di beberapa Polres dapat disimpulkan bahwa penguasaan materi hukum seperti penyelesaian melalui ADR belum dikuasai oleh Bhabinkamtibmas. Berikut ini beberapa Polda yang telah mengembangkan program kebijakan agar tidak terjadi konflik antara hukum adat dengan hukum nasional:
 - a. Polda Aceh. Di Polda Aceh tidak ada lagi tahap penyuluhan tetapi sudah sampai pengaturan pemerintah daerah, yaitu penitipan peran FKPM ke dalam Tuha Peuet di tingkat Gampong. Keterlibatan Bhabinkamtibmas terjadi di tingkat desa/kelurahan atau Gampong. Di tingkat desa/kelurahan ini, Kepala Desa/Lurah (Keuciek) bersama lembaga adat (TuhaPeuet) dengan melibatkan

Bhabinkamtibmas menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi masyarakat, yaitu penyelesaian 18 perkara adat (non pidana) yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Tuha Puet di tingkat desa/kelurahan. Jadi dengan demikian, ada kalanya Polsek memfasilitasi tempat untuk memutuskan kasus tersebut karena dianggap lebih nyaman, netral dan kasus tidak diketahui secara meluas di masyarakat desa/kelurahan. Berikut ini skema penyelesaian kasus-kasus yang termasuk 18 perkara dan tahap-tahap penyelesaian serta keterlibatan peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian perkara.



- b. Polda Jambi. Di Polda Jambi, lembaga adat yang berada di wilayah Polres Batanghari, telah menjalin kerjasama dengan Satuan Binmas Polres tentang penanganan pidana ringan yang dapat diselesaikan di tingkat masyarakat. Dengan demikian, kasus-kasus Tipiring diselesaikan dengan lembaga adat yang

difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas. Sementara itu, kasus tindak pidana berat tetap diproses ke pengadilan meskipun sudah diselesaikan secara adat dengan tetap menyertakan lampiran hasil penyelesaian/perdamaian yang diketahui oleh lembaga adat didalam BAP yang diproses oleh Satuan Reskrim.

10. Beberapa temuan penting tentang keberadaan tugas dan peran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan, yakni :

- a. Masyarakat belum memahami tugas dan peran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan sehingga masyarakat belum optimal memanfaatkan keberadaan Bhabinkamtibmas. Masyarakat masih mempertanyakan jam kerja Bhabinkamtibmas, hal ini terjadi karena kurang adanya informasi tentang tugas dan peran Bhabinkamtibmas.
- b. Bhabinkamtibmas belum optimal memberikan penyuluhan/informasi tentang proses penanganan tindak pidana yang sudah dilaporkan ke tingkat Polsek/Polres. Hal ini masih belum dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat selalu berpendapat bahwa Bhabinkamtibmas tidak memberikan peran dalam penyelesaian perkara.
- c. Bertambahnya pemekaran desa/kelurahansangat berpengaruh terhadap tugas Bhabinkamtibmas, karena jumlah desa/kelurahan menjadi bertambah. Kondisi seperti ini tidak diharapkan masyarakat terutama untuk desa/kelurahan yang memiliki kerawanan Kamtibmas tinggi.
- d. Masih perlu dilakukan sosialisasi pengertian Siskamling di wilayah Polda Aceh. Kalangan DPRD Aceh berpendapat tidak perlu dilakukan kegiatan Siskamling pada masyarakat Aceh karena konflik sosial sudah tidak ada lagi, Aceh sudah aman.
- e. Masih terjadi kecenderungan warga masyarakat melaporkan semua persoalan/kasus ke Polsek maupun Polres meskipun kemudian di seleksi laporan masyarakat yang dapat di selesaikan oleh masyarakat. Dari FGD dengan Kepala Desa/Lurah dan Tuha Peuet di Polda Aceh, dapat diketahui bahwa warga masyarakat tidak mau dipermalukan dengan adanya hukum cambuk karena dapat diketahui masyarakat luas.
- f. FKPM merupakan organisasi yang dikenal oleh desa dan tokoh masyarakat yang bersama-sama adat memecahkan persoalan masyarakat. Kehadiran FKPM membantu adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dahulu tidak ditangani oleh adat atau kasus-kasus yang muncul sejalan perkembangan masyarakat, seperti KDRT, kenakalan remaja, sengketa tanah. Namun demikian, desa khawatir tentang keberlanjutan FKPM ini karena FKPM tidak jelas siapa penanggungjawabnya, Pemda atau Polri. Masyarakat menginginkan ada kejelasan tanggungjawab FKPM dibawah Pemda atau Polri sehingga ada sumber pendanaan untuk menjalankan FKPM.

11. Sistem Pelaporan Bhabinkamtibmas

Laporan bulanan Bhabinkamtibmas di setiap sektor yang ditujukan ke Kapolres. Up. Kasat Binmas adalah laporan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di desa/kelurahan. Salah satu laporan kegiatan Bhabinkamtibmas menunjukkan bahwa kunjungan ke desa/kelurahan rata-rata 5 kali dalam setiap bulan. Lokasi yang dikunjungi adalah warung kopi, masjid, dll. Adapun kegiatan yang dilakukan disebutkan sambang desa, tatap muka dengan tokoh masyarakat, dan ikut gotong royong.

Di dalam laporan kegiatan Bhabinkamtibmas terdapat format hasil pemecahan masalah, namun tidak ada data kegiatan yang disampaikan atau nihil. Hal ini terjadi kemungkinan catatan penyelesaian masalah yang dilakukan baik di tingkat juring/dusun dan desa/gampong tidak tercatat atau jika tercatat tidak disampaikan ke Bhabinkamtibmas.

Sistem SMS (*short message service*) terutama di desa-desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai desa/kelurahan percontohan merupakan terobosan yang dilakukan di wilayah Polda Kalteng dalam rangka deteksi dini. Setiap Polsek ditunjuk satu desa/kelurahan percontohan dimana Bhabinkamtibmas harus menyampaikan situasi dan kondisi di desa/kelurahan tersebut melalui SMS.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Peran Bhabinkamtibmas sebagai pembimbing :
 - a. Responden warga masyarakat pada umumnya telah mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya.
 - b. Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan belum memberikan gambaran aktifitas yang dilakukan karena belum semua Bhabinkamtibmas melakukan pengenalan diri.
 - c. Bhabinkamtibmas belum optimal dalam melakukan komunikasi di desa/kelurahan yang menjadi binaannya.
2. Tugas Bhabinkamtibmas dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan:
 - a. Bhabinkamtibmas di Polda Jabar dan Polda Jambi lebih aktif dalam menyampaikan pendapat pada saat diminta hadir oleh perangkat desa/kelurahan.
 - b. Kehadiran Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya memberikan pengaruh secara berarti terhadap peningkatan wawasan masyarakat di bidang Kamtibmas.
 - c. Warga masyarakat desa / kelurahan sangat mengharapkan kehadiran personel Bhabinkamtibmas berseragam pada setiap saat, karena kehadirannya dapat mengurangi peluang terjadinya tindak kriminalitas.

- d. Pertolongan Bhabinkamtibmas terhadap korban musibah/bencana, belum dirasakan oleh warga masyarakat khususnya di Polda Bengkulu, Polda Sultra dan Polda Gorontalo.
 - e. Keterlibatan Bhabinkamtibmas belum optimal dalam pembentukan dan mengontrol kegiatan Siskamling di desa/kelurahan yang menjadi binaannya.
 - f. Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam membantu pemecahan masalah masyarakat di desa/kelurahan lebih dominan terjadi di Polda Jabar dan Polda Jambi.
3. Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator dan fasilitator :
 - a. Peran Bhabinkamtibmas dalam membantu pemecahan masalah di masyarakat melalui FKPM sangat minim, karena tidak semua desa/kelurahan ada terbentuk FKPM, di samping itu beberapa tempat FKPM sudah tidak difungsikan lagi.
 - b. Bhabinkamtibmas pada umumnya telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat apabila terjadi tindak kriminal.
 4. Peran Bhabinkamtibmas sebagai dinamisator dan motivator
 - a. Peran Bhabinkamtibmas pada umumnya masih kurang optimal dalam menggerakkan kegiatan positif lainnya di masyarakat.
 - b. Bhabinkamtibmas pada umumnya belum optimal dalam menyampaikan laporan mingguan kegiatan Bhabinkamtibmas itu sendiri maupun gangguan Kamtibmas dalam bentuk laporan informasi.
 - c. Bhabinkamtibmas pada umumnya jarang *mengup-date* data atau melakukan pembaharuan data yang diperoleh dari masyarakat, serta minimnya koordinasi dengan Babinsa dalam rangka pemecahan permasalahan gangguan Kamtibmas sejak stadium dini.
 - d. Bhabinkamtibmas pada umumnya belum maksimal menggunakan rencana kerja sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
 - e. Bhabinkamtibmas pada umumnya sudah memiliki buku saku/buku mutasi kegiatan dalam menjalankan tugas.
 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Minimnya jumlah personel Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya, sebagaimana di Polda Bengkulu (1:4), satu personel Bhabinkamtibmas dibebani empat desa/kelurahan. Sedangkan jumlah personel Bhabinkamtibmas yang mendekati ideal (1:1), satu personel Bhabinkamtibmas melayani masyarakat satu desa/kelurahan. Sebagaimana Polda Sultra, Polda Jambi, dan Polda Jabar. Sedangkan di Polda NAD, Gorontalo, Kalteng jumlah personel Bhabinkamtibmas dan desa/kelurahan yang dilayani, antara 1:2 dan 1:3.
 - b. Tugas rangkap dan tugas tambahan bagi personel Bhabinkamtibmas pada umumnya terdapat di seluruh Polda yang menjadi obyek Penelitian.
 - c. Dari total jumlah personel Bhabinkamtibmas, yang mendapatkan dukungan operasional berupa BBM paling banyak (58,5 %) di Polda Jambi, sedangkan dukungan paling kecil (9,7 %) di Polda Sultra.
 - d. Dari total jumlah personel Bhabinkamtibmas di seluruh Polda obyek penelitian, yang mendapat dukungan pulsa sekitar 2,4% sampai 15,6%, dan sarana kamera 0% sampai 33,3%.

- e. Bhabinkamtibmas pada umumnya telah memahami geografi, sumber daya alam dan Ipoleksosbudkam. Namun masalah demografi belum begitu dipahami.
- f. Bhabinkamtibmas di seluruh Polda yang menjadi obyek penelitian pada umumnya kurang mendapatkan pendidikan dan latihan fungsi Binmas.
- g. Pimpinan Satuan wilayah di seluruh Polda yang menjadi obyek penelitian pada umumnya selalu melakukan Wasdal tugas-tugas Bhabinkamtibmas.
- h. Pimpinan Satuan wilayah di seluruh Polda yang menjadi obyek penelitian pada umumnya belum memberikan *rewards* dan *punishment* secara konsisten atas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

B. Rekomendasi

1. Untuk memenuhi harapan masyarakat terkait dengan kehadiran personel Bhabinkamtibmas perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi secara intensif antara Kapolres, Bupati/Walikota dan DPRD guna memperoleh dukungan alokasi anggaran dalam rangka pemberdayaan Bhabinkamtibmas.
2. Kapolres perlu memanfaatkan teknologi komunikasi untuk efektifitas pelaporan dan penyampaian informasi dari personel Bhabinkamtibmas dengan memberdayakan PID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) yang ada di Satuan Kerja terkait dengan kegiatan dan perkembangan situasi di desa/kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Kapolda perlu memberdayakan personel Bhabinkamtibmas di samping melaksanakan tugas pokoknya, juga mengemban tugas intelijen dalam rangka deteksi dini.
4. Kapolda perlu mengimplementasikan program Binmas *Pioneer* sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka membangun kemitraan Polri dan masyarakat.
5. Terkait dengan minimnya pendidikan dan latihan yang berdampak pada kualitas personel Bhabinkamtibmas, Lemdikpol perlu menambah quota peserta pendidikan dan latihan Fungsi Binmas dan Fungsi Intelijen, serta penyempurnaan materi bahan pelajaran yang disesuaikan dengan *global village* (batas-batas kemasyarakatan memudar, potensi peningkatan konflik horizontal dan interaksi antar masyarakat semakin kompleks) (Kementerian PPN / Bapennas, RPJM 2015-2020).
6. Terkait dengan optimalisasi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, Direktur Binmas Baharkam Polri perlu mengusulkan tambahan alokasi anggaran untuk sarana kontak dan sarana transportasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah penugasan.
7. Kapolda/Kapolres mengoptimalkan/menugaskan personel Polri menjadi Bhabinkamtibmas, satu personel Polri satu desa/kelurahan.

Jakarta, Desember 2013
 KABID GASOPSNAL
 SELAKU KETUA POKJA PENELITIAN

Drs. SURYANTO
 KOMBES POL NRP. 63090844